

SKRIPSI



**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP AKSI ORGANISASI
MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM KAITANNYA
DENGAN KONFLIK KEAGAMAAN DI KOTA MAKASSAR**

OLEH :

ARIANTI

B111 10 919

BAGIAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP AKSI ORGANISASI
MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM KAITANNYA
DENGAN KONFLIK KEAGAMAAN DI KOTA MAKASSAR**

OLEH:

ARIANTI

B111 10 919

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Program Kekhususan Hukum Masyarakat Dan Pembangunan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP AKSI ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM KAITANNYA DENGAN KONFLIK KEAGAMAAN DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

ARIANTI

B 111 10 919

Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Program Studi Sarjana
Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Kamis, 12 Juni 2014
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H
NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H
NIP. 19700708 199412 1 001



A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : ARIANTI
Nomor Induk : B111 10 919
Bagian : Hukum masyarakat dan pembangunan
Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi
Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI)
Dalam Kaitannya dengan Konflik Keagamaan di
kota Makassar"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 29 april 2014

Pembimbing I



Prof. Dr. H.M. Arfin Hamid, S.H.,M.H
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing II



Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H
NIP. 19700708 199412 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ARIANTI**

No. Pokok : **B111 10 919**

B a g i a n : **Hukum Masyarakat dan Pembangunan**

Judul Skripsi : **Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan di Kota Makassar**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2014



a.n. Dekan
Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

ARIANTI (B111 10 919) “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) di Dalam Kaitannya Konflik Keagamaan di Kota Makassar “. Dibawah bimbingan Bapak Arfin Hamid selaku pembimbing I dan Bapak Hasbir Paserangi selaku pembimbing II

Skripsi ini membahas tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap aksi organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam kaitannya konflik keagamaan di kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini: 1) untuk mengetahui eksistensi Front Pembela Islam (FPI) terhadap aksinya sebagai organisasi masyarakat dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di kota Makassar, dan 2) Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat ditempuh untuk menangani aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di kota Makassar.

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, lokasi penelitian di kota Makassar, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dari berbagai sumber yakni pengurus FPI, NU, Muhammadiyah, MUI Kota Makassar serta pakar psikologi hukum, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan dengan membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa eksistensi organisasi kemasyarakatan FPI senantiasa dalam melakukan aksinya melakukan tindakan FPI seringkali melakukan tindakan anarkisme dan melanggar hak asasi manusia dengan alasan penegakkan amar ma'ruf nahi mungkar mengatas namakan penodaan agama, hal ini didasarkan doktrin organisasinya yang termuat dalam AD/ART FPI. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam rahmatan lilalamin dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Upaya yang ditempuh untuk menanggulangi aksi organisasi FPI kaitannya dengan konflik keagamaan adalah dengan menempuh dua cara, yakni cara yang bersifat preventif meliputi peningkatan pemahaman agama bagi anggota FPI, khususnya persoalan Jihad dan aparat kepolisian harus melakukan pengawalan ketat terhadap setiap aksi yang dilakukan oleh FPI, sedangkan cara yang bersifat represif keorganisasian adalah melakukan teguran secara tertulis, pemberhentian kegiatan, bahkan sampai pada pencabutan status badan hukum/pembubaran

Kata Kunci: Sosiologi Hukum, FPI dan Konflik Keagamaan

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut untuk diucapkan selain syukur dan sembah sujud-Nya atas segala ri'dho, karunia dan limpahan rahmat yang dianugerahkan untuk semua ummat atas seluruh manusia dan alam semesta, hanya kepada-Nyalah penulis selalu memohon untuk tetap bertahan dalam lindungan dan selalu berjalan di atas kuasa-Nya hingga tugas akhir/skripsi ini, selesai tepat pada waktunya.

Penulis menyadari tidak mungkin ada tulisan sekerdil ini tanpa ada peran turut serta orang dan kerabat dekat penulis, yang senantiasa memberikan dorongan dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis. Segenap dorongan dan dukungan itulah yang senantiasa memotivasi semangat dan menjadi syarat, sehingga dapat melakukan apa yang harus dilakukan. Terlebih seorang Ibu dengan jiwa dan belai lembut kasih sayangnya tuk anaknya, Ibunda tersayang Maryam, B.A yang senantiasa dan tak bosan memperingati anaknya agar segera meraih tittle Sarjana serta telah menjadi dosen pribadi yang mengajarkan segalanya dan juga menjadi idola terbaik diantara semua idola yang ada.

Tak lupa juga kepada kakak-kakak yang selalu setia menjadi penopang, men-*suport*, dan menjadi alasan besar meraih gelar Sarjana ini:

kakak Asifah, kakak Arifah dan kakak Arifuddin. Ucapan terima kasih pula

Penulis haturkan kepada:

1. **Prof. Dr. dr. A. Paturusi, Sp.Bo.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan beserta para Pembantu Rektor.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof.Dr. Aswanto, S.H.,M.Si.,DFM.** Dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. H.M Arfin Hamid,S.H.,M.Hum.** dan **Dr. Hasbir Paserangi,S.H.,M.H.**, sebagai Pembimbing I dan Pembimbng II penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. **Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., Ratnawati, S.H.,M.S., dan Achmad S.H.,M.H.** selaku penguji penulis.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta seluruh Staf dan Karyawan Akademik fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ustas Abdur Rahman selaku narasumber dari pengurus Front Pembela Islam (FPI) Kota Makassar, Drs. Abd. Wahid Thahir, M.Ag selaku narasumber dari pengurus Nahdatul Ulama Kota Makassar, kakak ikbal narasumber LSM Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak

Rakyat (LAPAR) Kota Makassar, dan Ustas maskur narasumber dari Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar.

7. Sahabat-sahabatku Nurul Fitriani Salim, Rasyidah Jalil dan Nurul Uya yang selau memberikan *support*. Terimakasih buat kalian.
8. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terkhusus kak Ipul, Kak Rusdi, Kak Umam, Kak Rudi dan semua sahabat-sahabat pergerakan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih buat kalian
9. Dan terakhir ucapan terima kasih buat teman-teman Sastra Arab Unhas terkhusus kak Wajid, dan Kak Sakir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Terakhir, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
.....	
A. Fungsi dan Peran Hukum.....	8
B. Efektivitas Hukum	13
C. Karakteristik Tinjauan Sosiologi Hukum	17
D. Organisasi Kemasyarakatan	28
E. Konflik	33
F. Kebebasan Beragama.....	38
G. Gambaran Umum Front Pembela Islam (FPI).....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	50
B. Jenis dan Sumber Data	52
C. Teknik Pengumpulan Data	52
D. Teknik analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	

A. Tinjauan Hukum Terhadap Eksistensi Front Pembela Islam (FPI) Sebagai Organisasi Masyarakat Dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan Di Kota Makassar	61
1.1 Dinamika Terbentunya Organisasi Front Pembela Islam (FPI) di Kota Makassar	61
1.2 Orientasi Gerakan Front Pembela Islam Kota Makassar	75
1.3 Korelasi Undang-Undang Ormas dengan eksistensi Front Pembela Islam.....	94
B. Upaya Yang Ditempuh Dalam Menangani Aksi Organisasi Front Pembela Islam Dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan Di Kota Makassar	99
1.1 Upaya Preventif	102
1.2 Upaya Represif	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA	117
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana dimaklumi bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, adat istiadat dan agama. Sehingga bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Di samping keberaneka-ragaman suku bangsa dan tidak meratanya persebaran penduduk, maka tidak heran apabila para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini menggunakan Kata “Bhinneka Tunggal Ika” yang menjadi slogan pemersatu, sekaligus merupakan identitas bangsa Indonesia yang artinya “berbeda-beda tapi tetap satu” ini merupakan pengamatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa Indonesia dengan melihat dan memahami perbedaan yang sangat beragam dan merangkumnya menjadi rujukan identitas bangsa Indonesia.

Unity in Diversity,¹ mengungkapkan kesatuan dalam konteks keberagaman, (Bhinneka Tunggal Ika) sebagai dasar paradigmatis bagi paham “persatuan” sebagai salah satu sila dalam Pancasila itu, yang juga turut sebagai paradigma filosofi bagi politik hukum nasional di Indonesia mulai dari bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga beragam agama dan aliran kepercayaan yang di

¹ Kelompok Gerakan Cinta Indonesia dalam bentuk blogger.
<http://indounityindeversity.wordpress.com>. akses: 9/11/13

yakini oleh setiap penduduknya. Baik dari agama yang berasal dari luar Indonesia yang dibawa oleh penyebar agama, demikian juga agama suku atau keyakinan-keyakinan dan aliran-aliran kepercayaan yang masih tumbuh subur di dalam masyarakat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keunikan bangsa ini yang harus disyukuri.

Menyadari sifat pluralitas dalam beragama yang dianut oleh penduduk di Indonesia, kendatipun Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya adalah agama islam. Indonesia yang telah disepakati sebagai Negara hukum memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga Negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ini terbukti bahwa masalah kebebasan beragama ini dengan tegas diatur di dalam konstitusi RI (Republik Indonesia). Dimana konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pengangan di dalam penyelenggaraan suatu Negara.

Mengurai masalah konstitusi maka tidak dapat terlepas dari apa yang menjadi muatan dari konstitusi itu sendiri. Ada tiga hal pokok yang menjadi muatannya² yaitu pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga Negara; kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Berdasarkan

²Mirza Nasution dan Iman Pasu Purba. *Jaminan Kehidupan Beragama Dalam Konstitusi* (Jakarta: Sofmedia. 2013), h. 34

muatan konstitusi ini, UUD 1945 sebagai konstitusi RI memuat tentang jaminan atas hak-hak asasi manusia khususnya masalah kebebasan beragama yang termasuk di dalam hak yang fundamental.

Terkait kebebasan beragama di Indonesia, masalah yang mendapat perhatian adalah adanya asumsi mengenai banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan yang bermasalah dilihat dari prespektif kebebasan beragama, peraturan itu bermasalah, baik karena dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama maupun karena bertentangan satu sama lain berdasarkan hirarkinya seperti dalam aturan UU No 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan Dan Penodaan Agama, misalnya salah satu yang banyak dikritisi. Aturan itu pada pokoknya melarang melakukan penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Ketentuan itu jelas mengisyaratkan Negara melindungi warga Negara Indonesia melalui perlindungan atas penyalagunaan dan penodaan agama, dan pada saat bersamaan melarang aliran agama lain itu untuk tidak membuat penafsiran di luar ajaran yang konvensional. Aturan itu selain dianggap bertentangan dengan semangat kebebasan beragama menurut konstitusi, juga dinilai sebagai bentuk intervensi Negara yang sebenarnya tidak perlu. Munculnya UU no 1/PNPS/1965 perlu ditelisik sungguh-sungguh karena UU ini menjadi landasan yuridis utama bagi banyak UU dan peraturan lain di bidang keagamaan. pasal 4 UU no.1/PNPS/1965 menambahkan “delik agama” pada KUHPid (pasal 156a) yang punya implikasi sangat

penting. Berbicara mengenai UU No.1/PNPS/1965, ada dua kelompok yang memberi respon terhadapnya. Ada yang meminta supaya aturan itu dicabut, tetapi ada yang menyatakan kalau aturan ini masih relevan dan keberadaanya masih sesuai dengan konstitusi RI. Kebebasan beragama ini perlu segera diselesaikan. Akan tetapi, harmonisasi dan sinkronisasi aturan hukum di bidang kebebasan beragama belum ditangani optimal. Masalah kebebasan beragama dan hubungan antarumat beragama sangat tergantung pada harmonisasi dan sinkronisasi aturan-aturan hukum tersebut.

Keadaan yang demikian itu menjadikan hukum di Indonesia sarat dengan muatan persoalan dan terjadi konflik atau bentrokan sesama manusia akibat bertentangan. Dalam konteks ini berbagai permasalahan menimpa bangsa Indonesia seperti masih adanya konflik sosial di berbagai tempat, kecenderungan masyarakat menyelesaikan konflik dengan caranya sendiri, tindakan sepihak, main hakim sendiri dan pengadilan massa, pelanggaran etika dan susila, munculnya aliran yang dianggap sesat dan cara-cara penyelesaiannya yang cenderung melanggar nilai-nilai moral dan nilai kemanusiaan serta norma-norma hukum sebagai bangsa timur dan bangsa yang religius.

Sebagai salah satu kondisi demikian fenomena yang menarik akhir-akhir ini yaitu penyerangan yang dilakukan oleh kelompok gerakan sosial, sebut saja gerakan yang mengatasnamakan agama. Salah satunya yaitu Front pembela islam yang merupakan organisasi kemasyarakatan. Gerakan

yang dilakukan yang mengatasnamakan agama ini sering melakukan aksi-aksi yang diikuti dengan tindakan kekerasan, salah satu indikator penyerangan yang dilakukan yaitu aksi penyerangan dalam konflik keagamaan aliran ahmadiyah serta beberapa aksi penggerebekan yang dalam aksi tersebut lebih kepada kekerasan, pengrusakan sampai pada penganiayaan.

Berbagai permasalahan di atas, mengakibatkan citra dan daya saing bangsa kita masih rendah, tingkat kenyamanan dan keamanan masih memprihatikan. Indonesia yang merupakan bangsa muslim terbesar di dunia yang dianggap sebagai bangsa yang memiliki etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam pengakuannya sebagai mayoritas bangsa religius. Akibat dari sikap sebagian umat islam ini sangat luas, berangkai, dan kontra produktif bagi bangsa dan Negara, khususnya bagi umat islam.

Dari indikator tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul untuk diteliti yaitu “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) Dalam Kaitannya Konflik Keagamaan Di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimanakah sosiologi hukum menilai eksistensi Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di kota Makassar?
2. Upaya apakah yang dapat ditempuh untuk menangani aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penulisan yaitu:

1. Untuk mengetahui eksistensi Front Pembela Islam (FPI) terhadap aksinya sebagai organisasi masyarakat dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di kota Makassar
2. Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat ditempuh untuk menangani aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di kota Makassar

Diharapkan penulisan ini berguna untuk:

1. Sebagai manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk menyelaraskan berbagai teori hukum yang diperoleh dari perkuliahan dengan berbagai temuan lapangan yang berkaitan dengan aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di kota Makassar, dari sudut sosiologi hukumnya, serta untuk menambah wawasan bagi penulis.

2. Sebagai cara praktis:

- a. Untuk mengetahui mengetahui eksistensi Front Pembela Islam (FPI) terhadap aksinya sebagai organisasi masyarakat dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di kota Makassar.
- b. Sebagai bahan informasi bagi aparat dalam upaya apakah yang dapat ditempuh untuk menangani aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi dan Peran Hukum

Dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat maka seiring itu hukum yang menjadi suatu kesepakatan yang mengatur dalam aspek kehidupan masyarakat diperlukan pula uraian dari fungsi dari hukum itu sendiri karena sifatnya yang mengikat, seperti penertiban pengaturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya, sehingga dapat mengiringi masyarakat yang berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasi dalam empat tahap, yaitu:

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.
3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan.
4. Fungsi kritis dari hukum.³

Selain itu, fungsi hukum dapat pula dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴

1. Fungsi hukum sebagai “*a tool of social control*”

Menurut Ronny Hantjo Soemitro: “kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi

³ Soejono Dirdjosisworo., *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2010), h.155-156

⁴ Achmad Ali., *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 86.

dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemi-danaan dan ganti rugi”

Dari penjelasan diatas bahwa hukum bukan satu-satunya alat pengendali atau pengontrol sosial. Hukum hanyalah salah satu alat kontrol sosial di dalam masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.

Menurut Ronny dalam Achmad Ali mengemukakan, “tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan yang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti kontrol sosial menentukan tingkah laku yang bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial makin berat nilai penyimpangan pelakunya. Berat ringannya tingkah laku menyimpang itu tergantung”.⁵

Masing-masing masyarakat berbeda kuantitas sanksinya terhadap suatu penyimpangan tertentu terhadap hukum. sebagai contoh, bagi masyarakat yang menganut secara konsekuen syariat islam, hukuman bagi pezina adalah hukuman fisik yang cukup berat, tetapi bagi masyarakat Eropa barat umumnya, hukuman bagi pezina (*overspel*) adalah jauh lebih ringan.

⁵ *Ibid.* h. 87.

Dalam simpulannya dari apa yang telah di uraikan di atas tentang hukum sebagai pengendalian sosial, yaitu:

1. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian didalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial.
2. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial merupakan fungsi “pasif” disini artinya hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat.

Selanjutnya sehubungan bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial masih ada hal lain yang perlu diketahui yaitu:

- a) Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, dapat dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang dewasa ini berwujud kekuasaan Negara, yang dilaksanakan oleh “*the ruling class*” tertentu atau suatu “elit”. Hukumnya biasanya berwujud hukum tertulis atau perundang-undangan.
- b) Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, dapat juga dijalankan sendiri “dari bawah” oleh masyarakat itu sendiri. Hukumnya biasa terwujud tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

Terlaksana atau tidak terlaksanakannya fungsi hukum alat penngendalian sosial, ditentukan oleh dua hal:

- a) Faktor aturan hukumnya sendiri.

b) Faktor pelaksana (orang) hukumnya.

2. Fungsi hukum sebagai “*a tool of social engineering*”

Dari terjemahan “*social engineering*” diistilahkan dengan kata rekayasa sosial dalam hal ini penggunaan dan pengfungsian hukum sebagai alat rekayasa sosial hanya dimungkinkan dalam wujud sistem hukum modern yang lebih banyak menggunakan aturan hukum tertulis alias peraturan, yang lebih banyak mengandalkan derajat kepastiannya pada sifat tertulisnya peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat perbedaanya dengan sistem hukum *anglo saxon* yang mengandalkan kepastian pada keterikatan pada preseden.

Untuk memahami lebih dalam, maka perlu dipaparkan apa yang dimaksud dengan sistem hukum modern? Dalam hal ini ada dua ciri sistem hukum modern, masing-masing dikemukakan oleh Marc Galanter dan David M. Trubek dalam Achmad Ali, yaitu:

- a. Hukum yang modern terdiri dari berbagai aturan yang diterapkan dengan cara yang tidak berbeda-beda dimana-mana. Berlakunya aturan-aturan itu bersifat teritorial dan tidak bersifat “pribadi”.
- b. Perundang-undangan modern bersifat transaksional.
- c. Kaidah-kaidah hukum modern adalah universalistis.
- d. Sistem-sistem ini bersifat hirarki.
- e. Sistem ini bersifat rasional.
- f. Sistem ini dijalankan oleh yuris.

- g. Sistem ini menjadi bersifat lebih teknis dan kompleks, timbullah perantara-perantara professional yang khusus menghubungkan mahkamah dengan orang-orang yang harus berhubungan dengannya.
- h. Sistem ini dapat diubah.
- i. Sistem ini bersifat politik.
- j. Tugas membuat undang-undang dan menerapkannya kedalam keadaan yang bersifat teknis dan pejabat-pejabatnya dibedakan dari fungsi-fungsi pemerintah lainnya.⁶

David M. Trubek mengemukakan 3 ciri pokok hukum modern yaitu;

- a. Merupakan sistem peraturan.
- b. Merupakan suatu bentuk tindakan manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan.
- c. Merupakan bagian sekaligus otonom terhadap Negara.

Penting diketahui dalam fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, adalah bahwa terjadinya perubahan sosial tidak mungkin semata-mata dilakukan oleh hukum, sehingga kalau ingin melihat peranan hukum dalam perubahan sosial, hal itu hendaknya dilihat dari sudut kemampuan hukum untuk melakukan suatu "*initial push*". Terjadinya perubahan sosial melalui suatu proses yang cukup kompleks serta tidak merupakan hasil hubungan yang langsung antara suatu faktor tertentu dengan suatu kejadian.

⁶ *Ibid.* h. 104.

Kompleksitas ini misalnya ditunjukkan melalui kemampuan suatu akibat untuk juga mempengaruhi dan memodifikasi penyebabnya.

Jadi peranan hukum yang diharapkan sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebagai alat rekayasa sosial, tidak lain menempatkan hukum itu sebagai motor yang nantinya akan menyebarkan dan menggerakkan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum tersebut. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka melainkan juga aktifitas birokrasi pelakunya.

B. Efektivitas hukum

Hakikatnya persoalan hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofi, juridis dan sosiologis.

Berkenaan dengan morfologi antar efektivitas hukum dengan persoalan-persoalan di sekitar penerapan, pelaksanaan dan penegakkan hukum tersebut, tidak jarang ditemukan ada warga masyarakat yang memvonis bahwa keadaan pemerintah (arti luas di Indonesia), secara empirik mencerminkan bahwa penerapan, pelaksanaan dan penegakkan hukum ternyata masih belum dan kurang efektif. Hal ini disebabkan fungsi hukum belum dijalankan sebagaimana seharusnya, sehingga berakibat tidak dapatnya ditujukan tujuan-tujuan positif dari hukum.

Menurut L.J. Van Apeldoorn dalam Syamsuddin Pasamai, mengemukakan bahwa efektifitas hukum berarti keberhasilan, kemanjuran atau kemujaraban hukum atau undang-undang untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai.⁷ Sedangkan Soerjono Soekanto dalam Zainuddin Ali, mengemukakan bahwa efektivitas pelaksanaan hukum sedikit banyaknya ditentukan oleh sahnya hukum tadi.⁸ Artinya apakah hukum tadi dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-orang atau badan-badan yang benar-benar mempunyai wewenang, yakni kekuasaan yang diakui oleh masyarakat.

Achmad Ali berpendapat, bahwa efektivitas hukum terkait dengan berbagai jawaban yang dibutuhkan terhadap berbagai pertanyaan. Misalnya faktor-faktor penyebab efektif ataupun tidak efektifnya hukum, benarkah tujuan hukum dapat dibelokkan sehingga berakibat tidak efektifnya hukum, benarkah dalam keadaan-keadaan tertentu hukum justru menimbulkan keruwetan, lalu bagaimana peran pengkomunikasian hukum untuk mengefektifkannya berlakunya. Sedangkan Selo Soemardjan, mengungkapkan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Usaha menanamkan hukum dalam masyarakat; yakni penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai dan menaati hukum.

⁷Syamsuddin Pasamai. *Sosiologi dan Sosialogi Hukum* (Makassar: Umitoha Uhkuwah Grafika, 2011). h. 201.

⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 2..

2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai yang berlaku; artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance*, *identification*, *internalization* atau kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
3. Jangka waktu penanaman hukum; yakni panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha menanamkan hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil yang diharapkan.

Jadi demikian, efektifitasnya hukum tidak perlu dikait-kaitkan dengan apakah seseorang setuju atau tidak setuju terhadap substansi hukum maupun prosedur hukum. akan tetapi masalah efektifitas hukum harus ditinjau dari:

- a. Optik normatif; memandang hukum sebagai seperangkat kaidah belaka, bersifat idealistis, mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.
- b. Optik sosiologi; memandang hukum sebagai gejala sosial atau gejala masyarakat.

Selain itu dalam efektifitas hukum dapat dilihat dari kesadaran hukum. ketaatan hukum dan efektifitas perundang-undangan yang merupakan tiga unsur yang saling berhubungan. Untuk kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan

orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat di mana ada tuntutan mendesak, misalnya kalau ia tidak mencuri maka anak satu-satunya yang ia sayangi yang dalam keadaan sakit keras akan meninggal karena tak ada biaya pengobatan.

Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kaulitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelman, yaitu:

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi;
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internazation*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Agar suatu undang-undang dapat diharapkan berlaku efektif, Adam Podgorecki mengemukakan bahwa di dalam menerapkan hukum sebagai sarana untuk mengadakan *social engineering* diperlukan kemampuan-kemampuan⁹ sebagai berikut:

- a. Penggambaran yang baik situasi yang dihadapi.

⁹Syamsuddin., *op.*, *cit.*, h. 198.

- b. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian dan penyusunan penilaian-penilaian tersebut kedalam tata susunan yang hirarkies sifatnya.
- c. Verifikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan. Artinya, apakah sarana-sarana yang telah dipilih benar-benar akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki atau tidak.
- d. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan-peraturan yang diperlakukan.
- e. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan dapat menetralsir efek-efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang diperlakukan.
- f. Perlembagaan peraturan-peraturan di dalam masyarakat, sehingga tujuan pembaharuan berhasil dicapai.

C. Karakteristik Tinjauan Sosiologi Hukum

Mulanya sangat sulit dipahami bahwa sosiologi dan hukum dapat dipersatukan, karena para ahli hukum semata-mata memperhatikan masalah *quid juris*, sedang para ahli sosiologi mempunyai tugas untuk menguraikan *quid facti* dalam arti mengembalikan fakta-fakta social kepada kekuatan hubungan-hubungan.

Sosiologi hukum yang merupakan disiplin ilmu yang baru dan masih muda sehingga masih mencari perumusan. Oleh karena itu pertanyaan

tentang sosiologi hukum “apakah yang menyebabkan lambatnya perkembangan sosiologi hukum itu?”

Pertanyaan tersebut disebabkan, karena ilmu baru ini dalam mempertahankan hidupnya harus bertempur di dua front. Sosiologi hukum menghadapi dua kekuatan, yakni dari kalangan para ahli hukum dan ahli sosiologi yang terkadang keduanya bersatu untuk menggugat keabsahan sosiologi sebagai disiplin yang berdiri sendiri. Akhirnya dalam pertentangan paham ini antara sosiologi dan hukum maka dengan memberi batas-batas yang jelas kepada ruang lingkup dan cara-caranya. Untuk itu sebuah analisis akan dimensi-dimensi kenyataan sosial yang terdiri dari berbagai lapisan perlu diferensiasi di dalam sosiologi sebagai bedah untuk melihat dalam hukum. Adapun untuk mengetahui “sosiologi hukum” maka berikut ini beberapa pandangan para pakar sosiologi hukum, diantaranya:

Soejono Soekanto dalam Zainuddin Ali¹⁰ yaitu sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Di dalam buku Achmad Ali dikemukakan enam (6) butir karakteristik sosiologi hukum yang dicetuskan oleh Roscoe Pound yaitu sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Zainuddin Ali., *op.cit.*, h. 1.

¹¹ Achmad Ali., *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yasrif Watampone, 1998), h. 14-17.

1. Bahwa sosiologi hukum memperhatikan efek-efek sosial yang aktual dari pranata-pranata hukum maupun doktrin-doktrin hukum.
2. Sosiologi hukum berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak cukup hanya membandingkan undang-undang itu satu sama lain. Hal yang lebih penting adalah studi tentang pengoperasian kemasyarakatan perundang-undangan tersebut dari efek-efek yang dihasilkan oleh perundagan-undangan itu.
3. Studi sosiologi hukum ditujukan bagaimana membuat aturan menjadi efektif.
4. Yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang doktrin-doktrin yang telah dihasilkan dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. Malahan hal itu menunjukkan kepada kita bagaimana hukum di masa lalu tumbuh diluar kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan psikologi.
5. Sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut, artinya memahami aturan hukum sebagai penuntut umum bagi hakim, yang menuntut hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana hakim diberi kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan padanya sehingga hakim dapat mempertemukan antara

kebutuhan keadilan di antara para pihak dengan alasan umum dan orang pada umumnya

6. Sosiologi hukum dititik beratkan pada usaha untuk lebih mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum.

Pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum yang seperti dipahaminya bahwa karakteristik kajian sosiologi hukum ada 4 kajian yaitu¹²:

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara.

Karakteristik sosiologi hukum semakin jelas jika memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa:

¹² *Ibid.*, h. 8-9.

“Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan, dalam kitab ujian ini dengan seksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori social mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya , memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila di sini boleh diipakai ‘sebab-sebab sosial’, maka sebab-sebab demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain”.¹³

Adapun penjelasan lain yaitu dari Bruggink dalam Salim mengemukakan bahwa sosiologi hukum merupakan terori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan masyarakatnya.¹⁴ hubungan hukum ini dapat dipelajari dengan dua cara, yaitu:

1. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan
2. Menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum.

Selain itu Meuwissen dalam Salim, menambahkan pandangannya bahwa sosiologi hukum yaitu hukum positif yang berlaku (artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempatnya) dengan faktor kemasyarakatan.¹⁵ Karakteristik sosiologi yang telah diungkapkan dari beberapa pemikir merupakan pengetahuan kunci dalam melakukan

¹³ Achmad Ali., *op.cit.* h. 17.

¹⁴ H. Salim., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 65.

¹⁵ H.Salim, *Op.cit*, hlm. 66

penyelidikan pada sosiologi hukum. Sehingga sosiologi hukum bukan sekedar sosiologi ditambah hukum.

Penting pula diketahui apa yang dikemukakan Soetandyo Wingjosoebroto yaitu ilmu hukum pun dapat dibedakan ke dalam dua bidang spesialisasi ini. disatu pihak hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu *skin-in system* (study mengenai *law in books*) sedang dipihak lain hukum pun dapat dipelajari dan diteliti *skin-out system* (studi mengenai *law in action*).¹⁶ Didalam studi ini, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang secara riil berkait-kaitan dengan variable-variabel. Sehingga dalam memahami studi ini petama-tama harus mampu membaca, mengenal, dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya.

Selanjutnya bahwa masalah yang tidak asing lagi dimana hukum merupakan suatu gejala sosial sebagaimana halnya dengan ekonomi, politik, pendidikan dan seterusnya. Untuk itu mengetahui tujuan dari hukum itu sendiri sangatlah penting yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan di pisahkan dalam tujuan hukum timur dalam istilah: “keadilan adalah keharmonisasian dan keharmonisan adalah kedamaian”

Melangkah kepada objek kajian sosiologi hukum maka Achmad Ali mengemukakan secara garis besar dari kajian sosiologi hukum sebagai berikut:

¹⁶ Achmad Ali., *op.cit.*, h. 18.

1. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald Black sebagai *government social control* dalam kaitan ini sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
2. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial yang menyadari eksistensi berbagai kaidah sosial yang ada di dalam masyarakatnya, mencakup kaidah hukum, kaidah moral, kaidah agama, dan kaidah sosial lainnya, dan dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya.
3. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi (stratifikasi yang dimaksud adalah yang dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan).¹⁷

Objek dari kajian sosiologi tersebut untuk lebih jelasnya dapat dikaji pula lebih dalam yang dilihat dari basis sosial hukum serta hukum dan kekuatan-kekuatan sosial yaitu dalam model paradigma sosiologi hukum yang merupakan pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Berikut ini dikemukakan pengaruh timbal balik tersebut oleh Raden Otje Salman¹⁸ yaitu sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid*, h. 18.

¹⁸ Zainuddin Ali., *op.*, *cit*, h. 28-29.

1. Kelompok-kelompok sosial terhadap pengaruh timbal balik antara hukum. Kelompok-kelompok sosial dimaksud adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu hukum. Sebagai contoh, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru (YAMIBA). Hukumnya adalah anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Lembaga-lembaga sosial terhadap pengaruh timbal balik antara hukum. Lembaga-lembaga sosial dimaksud adalah suatu lembaga yang diakui keberadaanya di dalam masyarakat. Sebagai contoh:
 - a. Dasar hukumnya adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah
 - b. Perkawinan hukumnya adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
 - c. Waris: hukum adat dan hukum islam
 - d. Wakaf: hukum adat, hukum islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
3. Stratifikasi terhadap pengaruh timbal balik antara hukum. Stratifikasi dimaksud adalah pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat. Namun stratifikasi yang dimaksud tetap memperhatikan pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan mengenai persamaan di hadapan hukum seperti pasal 27 UUD 1945, yaitu hukum tidak membedakan meskipun kenyataanya ada lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat.

4. Kekuasaan dan kewenangan terhadap pengaruh timbal balik antara hukum. Kekuasaan dan kewenangan dimaksud diatur oleh hukum. Sebagai contoh dapat diungkapkan bahwa presiden, kekuasaan dan kewenangannya diatur oleh UUD 1945.

5. Interaksi sosial terhadap pengaruh timbal balik antara hukum.

Interaksi sosial yang dimaksud, hukum berfungsi untuk memperlancar interaksi sosial.

6. Perubahan-perubahan sosial terhadap pengaruh timbal balik antara hukum. Perubahan sosial dimaksud adalah:

a. Perubahan sosial mempengaruhi perubahan hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Perubahan hukum menimbulkan perubahan sosial seperti undang-undang narkoba tahun 1976 sebagai perubahan dari ketentuan peninggalan belanda, di mana bukan hanya pematik, tetapi juga penanam dan pengedar mendapat juga hukuman yang berat. Juga, khusus menyangkut masyarakat petani, yang tadinya tidak mengetahui bahwa tanaman ganja dilarang (petani jadi tahu apa itu narkoba).

c. Masalah sosial terhadap pengaruh timbal balik antara hukum.

Masalah sosial dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, hukumnya: KUHP dan acara pidana.

Selanjutnya pakar sosiologi hukum lainnya yaitu Talcott parson mengatakan bahwa masyarakat mempunyai dua macam lingkungan, yaitu *ultimate reality* dan *fisik urganik*. Masyarakat mengorganisir sedemikian rupa untuk dapat menghadapi dua lingkungan tersebut, masyarakat mengorganisir diri kedalam beberapa sub-sistem, masing-masing: sub-sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya.¹⁹

Tiap-tiap subsistem memiliki ciri khas masing-masing seperti subsistem budaya dimana berfungsi mempertahankan pola *pattern maintenance* yaitu tanpa kebudayaan, maka masyarakat tidak dapat berintegrasi, tidak dapat berdiri sebagai kesatuan. Subsitem sosial yang berfungsi sebagai integrasi (*integration*) yaitu berarti proses-proses atau hubungan-hubungan di dalam masyarakat diintegrasikan menjadi satu sehingga masyarakat dapat merupakan satu kesatuan. Subsistem ekonomi yang berfungsi sebagai *adaptation* yaitu bagaimana masyarakat itu dapat memanfaatkan sumber daya di sekitarnya secara fisik organik.

Yang terakhir yaitu subsistem politik yaitu bersifat *goal pursuance* yang berarti setiap warga masyarakat selalu mempunyai kebutuhan untuk mengetahui kearah mana tujuan masyarakat itu digerakkan. Dengan politik masyarakat dihimpun sebagai satu totalitas untuk menentukan satu tujuan bersama.

¹⁹ Achmad Ali., *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 287-288.

Menurut Talcott Parsons menguraikan tentang adanya hubungan antara masing-masing sub sistem dan mengenal adanya dua arus, yaitu arus informasi dan arus energi. Dan arus yang tertinggi adalah arus sub sistem ekonomi. Subsistem budaya sangat kaya dengan ide, tetapi miskin dalam energi.

Konsep Talcott Parsons ini dinamai konsep *Sibernetik* dimana arus informasi terbesar pada sub sistem budaya, dan semakin kecil ke sosial, politik, dan terakhir pada ekonomi. Sebaliknya arus energi terbesar pada ekonomi semakin kecil pada politik, sosial dan terakhir budaya. Hukum dengan segala perangkat serta perwujudannya tumbuh dan berkembang bersama berbagai faktor non-hukum yang ada dilingkungannya seperti faktor politik, faktor ekonomi, faktor agama, faktor kultur, faktor sosial dan sebagainya.

Serupa yang dikemukakan oleh pakar sosiologi hukum Leon Duguit yaitu:

“Law arisen not from the actions of governors of a state, but from the facts of life within a community. The rules of law (reflecting economic and morals norms) are based on the community’s recognition of their significance for social cohesions (hukum tumbuh bukan dari perbuatan pemerintah, tetapi dari fakta-fakta sosial di dalam suatu komunitas. Aturan hukum merupakan pencerminan kaidah-kaidah ekonomi dan moral, yang didasarkan pada pengakuan masyarakatnya tentang kesignifikannya bagi ikatan kemasyarakatannya).²⁰

Penting pula mengetahui uraian dari Achmad Ali yaitu:

²⁰ Achmad Ali, *op.*, *cit*, h. 54.

“Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serba benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu kesatuan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal”.²¹

Adanya Hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa pergaulan antarmanusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. selain hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya ini, terdapat jalinan hubungan yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Namun adakalanya hukum tidak sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah sosial lainnya itu.²²

Sejalan dengan itu bahwa perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal diaturnya. Sehingga ketika hal-hal diaturnya tadi telah berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum lebih efektif dalam pengaturannya.

²¹ *Ibid.*, h. 35.

²² Mochtar kusumatmadja., *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2004), h. 4.

Khusus mengenai kaidah-kaidah sosial yang dapat mengalami perubahan menurut Grossman & Grossman adalah:

1. Perubahan pada kaidah-kaidah individual. Ini meliputi perubahan tingkah laku individual, namun belum dapat dianggap sebagai perubahan kaidah tingkah laku.

2. Perubahan pada kaidah-kaidah kelompok

Ini terjadi dalam hal perubahan berlangsung pada satuan-satuan yang tergolong pada subsistem politik.

3. Perubahan pada kaidah-kaidah masyarakat

Ini merupakan perubahan yang paling fundamental sifatnya karena meliputi perubahan-perubahan nilai atau kaidah-kaidah dasar masyarakat.²³

Achmad Ali mengungkapkan bahwa kesenjangan yang dimaksud sebagai sumber yang membutuhkan adanya perubahan hukum, adalah terhadap perubahan pada kaidah-kaidah masyarakat. Sedangkan perubahan pada jenis pertama dan kedua belum memaksa hukum untuk segera melakukan penyesuaian terhadapnya.²⁴

Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang dimaksud adalah hukum tertulis atau perundang-undangan (dalam arti luas). Hal ini sehubungan dengan kelemahan perundang-undangan yang bersifat statis dan kaku. Dalam

²³ Achmad Ali., *op.*, *cit*, h. 192.

²⁴ *Ibid.*,

keadaan yang telah mendesak, perundang-undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat. Apakah ciri yang menandai adanya kesenjangan antara hukum dan peristiwa yang seyogyanya diaturinya sehingga mendesak untuk diadakan perubahan hukum. Ciri atau tanda itu menurut Dror “adalah ditandai dengan tingkah laku warga masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban yang dituntut oleh hukum, sebagai sesuatu yang harus dijalani.”²⁵

Jadi terdapat kesenjangan yang membedakan antara tanggapan hukum disatu pihak dan masyarakat dipihak lain mengenai perbuatan yang seyogianya dilakukan. jadi “*das sollen*” sudah berbeda jauh daripada “*das sein*”. Sehubungan dengan kesenjangan tersebut, Dror membedakan antara *tension* (*ketegangan*) antara hukum dan peristiwa konkrit yang diaturinya adalah masih dalam batas wajar, namun jika ketegangan telah mencapai taraf ketertinggalan (*lag*) barulah dibutuhkan segera perubahan hukum untuk menyesuaikan diri. hukum bertujuan mengkoordinir aktivitas-aktivitas warga masyarakat di mana aktivitas-aktivitas itu senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat.²⁶

Namun demikian perlu di dilihat terhadap kesadaran hukum (rakyat) yang merupakan hal-hal yang belum diperkembangkan, walaupun perhatian kearah itu telah banyak. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu tidak

²⁵ Achmad Ali, *op.,cit*, h. 193.

²⁶ Achmad Ali, *loc.,cit*.

dapat dikaji dari satu sudut saja, namun harus dikaji secara keseluruhan. Yang mendasar bahwa apakah faktor-faktor suatu ketentuan hukum tersebut diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Sehingga menjadi pertimbangan masyarakat dalam bertindak sebelum terjadi konflik yang nyata.²⁷

Adapun dalam lingkungan kemasyarakatan yang membagi menjadi 3 dalam dalam jenis-jenis hukum yang bersesuaian dengan bentuk-bentuk kemasyarakatan yaitu:²⁸

1. Hukum sosial massa adalah ikatan persatuan dalam massa itu sangat lemah, tetapi daya tekannya sangat kuat, maka hukum sosial yang mengintegrasikannya adalah yang paling kuat berlakunya dan lebih banyak melakukan kekerasan pada hakikatnya, karena berlakunya segala hukum itu bergantung kepada jaminan yang menjadi dasar kekuasaan untuk memaksa, hukum yang mengintegrasikan massa sulit untuk mengatakannya, bahwa kedudukannya kuat, integrasi yang dicapainya kelihatan hanya pada permukaannya saja.
2. Hukum sosial perkauman adalah karena perkauman (*community*) pada dasarnya bersifat suatu peleburan, untuk sebagian, (*partial fusion*) dan tekanan, maka pada dasarnya hukum sosial yang timbul dari padanya tentunya di tandai oleh sifat-sifat yang cukup mengikat dan keras.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah., *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 216

²⁸ Alvin s. Johnson., *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 204-205.

3. Hukum sosial communion adalah peleburan sebagaian (*partai fusion*) yang paling kuat dan tekanan yang paling lemah, maka hukum sosial yang timbul daripadanya pada dasarnya adalah yang paling berwibawa dan paling kurang memerlukan tekanan.

Selain itu menurut Sajipto Raharjo menguraikan tentang dua aspek kerja hukum dalam hubungannya dengan perubahan sosial yaitu:

1. Hukum sebagai sarana *control social*

Sebagai sarana *control social* diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Hukum sebagai sarana *social engineering*

Penggunaan hukum secara sadar *social engineering* adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana di cita-citakan, atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang di inginkan.²⁹

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, merupakan ciri yang melekat pada setiap masyarakat. Betapa pun lambatnnya proses perubahan tersebut, akan tetapi tak ada masyarakat yang statis atau pun mandeg sama sekali. Dengan diakuinya proses perubahan sebagai ciri yang melekat pada setiap masyarakat, maka semakin nyatalah hubungan timbal

²⁹ Sudjono Dirjosisworo., *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Social* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 76

balik antar hukum dengan bidang-bidang kehidupan lainnya seperti bidang politik, ekonomi, pendidikan, pertahanan-keamanan, agama dan lain sebagainya. Dari kenyataan-kenyataan tersebut. Maka tampak menonjolnya paling sedikit tiga karakteristik hukum yaitu:

1. Adanya kecenderungan untuk mempertahankan stabilitas.
2. Oleh karena hukum mengatur hubungan-hubungan sosial yang terjadi, maka disini diperlukan dan dipentingkan segi formalismenya.
3. Dipentingkannya ketertiban.³⁰

Adapun pandangan mengenai makna perubahan hukum dapat dilihat pada pandangan Lawrence M Friedman dalam Achmad Ali mengemukakan tentang 3 unsur hukum berubah dimana Friedman mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan perubahan hukum, maka perubahan itu dapat terjadi pada tiga unsur yang terkandung dalam hukum yaitu:

1. Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.
2. Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

³⁰Soerjono Soekanto., *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Social* (Bandung: Alumni, 1982), h. 242.

3. Kultur hukum

Penamaan untuk unsur tuntutan atau permintaan. tuntutan tersebut datang dari rakyat atau para pemakai jasa hukum, seperti pengadilan.³¹

Selanjutnya fenomena yang sangat mirip dengan tawuran dan juga kini menjadi *trendy* diberbagai kota di Indonesia yaitu kerusuhan massal. ketidakotonoman hukum juga sangat tampak dalam berbagai kerusuhan massal tersebut. Adanya fenomena kerusuhan massal seperti aksi penyerangan yang masuk dalam kategori kejahatan kekerasan karena merugikan beberapa warga yang menjadi korban dalam kerusuhan tersebut hal ini dapat di kaitkan dengan “teori Smelser”, dimana menurut Smelser mengemukakan empat unsur yang terdapat dalam setiap *action* yaitu:³²

1. *Values, or general sources of legitimacy*
2. *Norms, or regulatory standards for interaction*
3. *Mobilization of individual motivation for organized action in roles and collectivities.*
4. *Situasional facilities, or infoemation, skills, tools, and obstacles in the pursuit of concrete goals.*

³¹ Achmad Ali, *op.cit*, h. 202.

³² *Ibid*, h. 69-70.

Sehubungan dengan unsur-unsur tersebut diatas, Smelser memandang juga ada empat asas agar suatu tindakan tergolong kedalam tingkah laku kolektif, yaitu:

1. *The value-oriented movement is collective action mobilized in the name of a generalized belief envisioning a reconstitution of values.*
2. *The norm-oriented movement is action mobilized on the basis of generalized belief assigning responsibility for an undesirable state of affair to some agent.*
3. *The craze and the panic are forms of behavior based on a generalized redefinitions of situational facilities.*

Jadi Smelser berpandangan bahwa asas-asas yang harus ada terhadap suatu tindakan kelompok mencakup:

1. Gerakan yang berorientasi nilai, yang dimobilisir melalui tindakan kolektif atas nama kepercayaan umum yang tindakan kolektif atas kepercayaan umum yang mengharapkan perumusan ulang nilai-nilai tertentu.
2. Gerakan yang berorientasi norma, yang dimobilisir melalui tindakan kolektif atas nama kepercayaan umum yang mengharapkan perumusan ulang norma-norma tertentu.
3. Berwujud ledakan kebencian yang di mobilisir melalui tindakan kolektif atas nama kepercayaan umum yang menuntut tanggungjawab suatu pranata terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang tidak diinginkan.

4. Tindakan gila-gilaan dan kepanikan-merupakan bentuk-bentuk tingkah laku yang didasarkan oleh suatu redefinisi umum terhadap fasilitas yang sifatnya situational.

Tidak dapat menggenalisir faktor penyebab kerusuhan-kerusuhan tersebut, karena masing-masing memiliki kespesifikan yang sifatnya situasi-situasi lokal tertentu. meskipun demikian ciri-ciri umum dari kerusuhan itu misalnya sifatnya yang *spontan dan sporadik, kolektif, vandalistis, brutal, beringas, endemis, insidentil dan destruktif*. memiliki kesamaan dalam hal berwujud peledakan, rasa tidak puas, dendam, kebencian dan frustrasi.

Secara umum Achmad Ali mengemukakan bahwa penyebab umum dari semua kerusuhan massal yang terjadi adalah pergeseran yang terlalu cepat di berbagai faktor seperti pergeseran yang drastis dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, kultural yang diikuti pula oleh pergeseran struktur, posisi, fungsi dan ikatan-ikatan dalam hubungan sosial. kesemuanya itu menimbulkan apa yang diistilahkan sebagai krisis adaptasi, di mana di saat terjadinya berbagai pergeseran drastis, sementara itu beberapa kelompok masyarakat belum siap mengikuti pergeseran yang cepat itu, dan akibatnya terjadilah yang oleh sosiologi dinamakan: *social lag, economic lag*, ataupun *cultural lag*, yaitu ketertinggalan yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. ketertinggalan-ketertinggalan itu tentu saja menimbulkan berbagai kegelisahan, kekecewaan, kedengkian, kebencian, yang pada akhirnya secara spontan selalu menggunakan momen-momen

tertentu sebagai momen peledaknya.³³ Dari berbagai kerusuhan massal yang terjadi, bahwa yang membuktikan betapa nilai-nilai agama, hukum dan moral belum menjadi nilai instrinsik dari sebagian warga masyarakat kita. Agama hanya dipandang sebagai simbol yang sakral dan hukum hanya dipandang sebagai simbol yang formal.

Bagaimanapun, suka atau tidak suka, hukum dihalalkan untuk menjatuhkan sanksi eksternal terhadap pelaku kriminal. Dari batasan, ruang lingkup maupun prespektif sosiologi hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapatlah dikatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah sebagai berikut:³⁴

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
3. Sosial hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

³³ *Ibid.*, h. 69-70.

³⁴ Soerjono Soekanto., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2004)

D. Organisasi Kemasyarakatan

kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia.³⁵ menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Melihat perkembangan selanjutnya bahwa agama yang resmi diakui oleh pemerintah hanya ada lima atau enam apabila ditambah dengan konghucu, namun organisasi dan gerakan keagamaan di Indonesia pada umumnya sangat banyak dan kalau dicermati lebih teliti itu bagaikan bakteri. Dikalangan umat islam misalnya yang paling populer dan menjadi *mainstream* adalah Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama), disamping itu terdapat organisasi dan sekaligus gerakan islam lainnya. Masing-masing

³⁵ Pasal 28 ayat (2) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

gerakan islam tersebut memiliki berbagai aliran dan memengang teguh prinsip aliran yang di anggapnya benar.

Organisasi sosial keagamaan dan lembaga keagamaan adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan baik kegiatan maupun profesi, fungsi dan agama; yang dulunya diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1985, namun beberapa kontroversi dan realitas mengenai organisasi kemasyarakatan di lapangan pemerintah menganggap Undang-undang ini sudah tidak dapat mengikuti perkembangan masa sekarang. Setelah terjadinya perundingan dan pertimbangan maka Sesuai dengan bunyi Pasal 87, undang-undang tersebut mulai berlaku sejak diundangkan yakni 22 Juli 2013. maka Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tidak berlaku lagi.³⁶

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan dasar dan falsafah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga Negara, baik secara individu maupun kolektif, termasuk Ormas wajib menjadikan Pancasila sebagai napas, jiwa, dan semangat dalam

³⁶Anonim, UU Ormas Disahkan Organisasi Pelaku Kekerasan Bis Disanksi. <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/25/UU-Ormas-Disahkan-Organisasi-Pelaku-Kekerasan-bisa-Disanksi>. Diakses tanggal 10 November 2013 pukul 23.59 WITA

mengelola Ormas. Pengakuan dan penghormatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar dan falsafah berbangsa dan bernegara, tetap menghargai dan menghormati kebhinnekaan Ormas yang memiliki asas perjuangan organisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila, dan begitu pula Ormas yang menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya.

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya organisasi kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. Penentuan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup nasional, provinsi, kabupaten/kotamadya sesuai dengan keberadaanya yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Adapun jenis dan dasar pembentukan organisasi kemasyarakatan yaitu:³⁷

1. Jenis dan Cara Pembentukan

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.³⁸

³⁷Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang *Organisasi Kemasyarakatan*, pasal

³⁸ *Ibid*, pasal 18

2. Asas dan Tujuan

Organisasi kemasyarakatan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Organisasi kemasyarakatan menetapkan tujuan dengan mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁹

3. Tujuan dan Fungsi Ormas

a. Ormas bertujuan untuk:⁴⁰

- a) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
- b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c) Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
- e) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- f) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- g) Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

³⁹ *Ibid*, pasal 3

⁴⁰ *Ibid*, pasal 4

- h) Mewujudkan tujuan negara.
- b. Organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai:⁴¹
 - 1) Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
 - 2) Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
 - 3) Penyalur aspirasi masyarakat
 - 4) Pemberdayaan masyarakat
 - 5) Pemenuhan pelayanan sosial
 - 6) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
 - 7) Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

E. Konflik

Konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Menurut George Simmel Karena konflik memiliki fungsi positif. Sedang menurut Karl Marx bahwa “konflik menjadi dinamika sejarah”. Selain itu Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa konflik “Menjadi entitas hubungan sosial”. Lanjut Max Weber “dan konflik adalah bagian dari proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia” . pengertian konflik tersebut menekankan bahwa manusia adalah

⁴¹ *Ibid*, pasal 6

mahluk konflik (*homo konfliktus*) yaitu mahluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, persaingan baik sukarela maupun terpaksa.⁴²

Jika memahami konflik pada dimensi sekarang ini, maka unsur-unsur yang ada di dalam konflik adalah persepsi, aspirasi, dan aktor yang terlibat didalamnya. artinya dalam dunia sosial yang ditemukan persepsi, maka akan ditemukan pula aspirasi dan aktor. Menurut Novri Susan mengemukakan bahwa konflik biasa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar orang (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antara kelompok dengan Negara (*vertical conflict*), konflik antar Negara (*inter state conflict*). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya.⁴³

Konflik itu merupakan alat untuk menyesuaikan norma-norma dengan keadaan dan kondisi baru atau perkembangan masyarakat. adapun pendapat lain yaitu Toboni⁴⁴ yaitu bahwa konflik merupakan suatu bentuk pertentangan alamiah yang di hasilkan oleh individu atau antar kelompok yang berbeda, karena mereka memiliki perbedaan dalam nilai, kepercayaan, sikap dan kebutuhan. Hubungan yang bersifat kompetitif dan meningkat menjadi konflik apabila sumber daya yang dikompetitifkan terbatas, sementara sekelompok yang satu memperoleh lebih sedangkan lainnya kekurangan. Konflik muncul

⁴²Novri Susan., *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 4.

⁴³*Ibid.*, h. 6.

⁴⁴Tobroni., *Relasi Kemanusiaan dalam Keberagamaan*, (Bandung: Putra Darwati, Bandung, 2012), h. 68-69.

akibat keseimbangan dalam masyarakat tidak terjadi atau *ekuilibrium* mengalami guncangan akibat dominasi salah satu kelompok terhadap sumberdaya bersama. Perekrutan umat, pemilihan dalam partai politik dan sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan lainnya adalah hal-hal yang rawan memicu konflik.

Selain itu Kornblurn mengemukakan pandangannya tentang konflik bahwa telah menjadi fakta bahwa konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial politik.⁴⁵ Sedangkan menurut Berger tentang timbulnya suatu konflik⁴⁶, yaitu:

1. Alat untuk memelihara solidaritas.
2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lainnya.
3. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi.
4. Konflik berfungsi sebagai komunikasi.

Konflik yang merupakan kondisi dalam perubahan sosial. Maka konflik dapat ditelaah dari pelbagai aspek, sebagai berikut⁴⁷:

1. Secara historis, maka konflik antara masyarakat-masyarakat memainkan suatu peranan penting dalam pembentukan unit-unit sosial yang lebih besar dan lebih luas, memperkuat sistem stratifikasi sosial dan memperluas difusi penemuan-penemuan baru dibidang sosial budaya. Di dalam zaman modern, konflik

⁴⁵ Novri Susan, *op., cit.*, h. 1.

⁴⁶ Yesmil Anwar dan Adang., *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 207.

⁴⁷ Soerjono Soekanto., *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 26.

internasional telah mempengaruhi struktur ekonomi dan politik dari pelbagai masyarakat, kebijaksanaan-kebijaksanaan politik, maupun norma-norma, walaupun perhatian terhadap masalah-masalah itu tidak banyak.

2. Konflik antar golongan mungkin mendorong terjadinya perubahan dan penemuan-penemuan baru.
3. Adanya atau kemungkinan terjadinya konflik antargenerasi.

Adapun perspektif konstruksi konflik yang dikembangkan secara khusus oleh seorang sosiologi perdamaian yaitu John Paul Lederach⁴⁸ yaitu:

1. Konflik sosial dipahami sebagai hal yang alamiah, suatu pengalaman-pengalaman umum yang hadir disetiap hubungan dan budaya.
2. Konflik di pahami sebagai kejadian konstruktif kebudayaan secara sosia. Konflik tidak hanya terjadi pada seseorang, tetapi orang merupakan peserta aktif dalam menciptakan situasi dan interaksi yang mereka ambil pengalaman sebagai konflik.
3. Konflik muncul melalui proses interaktif yang melandaskan pada pencarian dan penciptaan makna bersama.
4. Proses interaktif di sempurnakan melalui dan di akarkan dalam persepsi manusia, interpretasi, ekspresi, dan niatan-niatan, yang semuanya tumbuh dari dan berputar kembali ke keadaan umum mereka (*common sense*)

⁴⁸*Ibid*, hlm. 67-68

5. Pemaknaan muncul sebagaimana manusia meletakkan diri mereka sendiri dan sesuatu yang sosial seperti situasi, kejadian, dan tindakan di dalam pengetahuan terkumpul mereka.
6. Kebudayaan berakar di dalam pengetahuan bersama dan skema-skema dan digunakan oleh sekelompok orang untuk merasakan, menafsirkan, mengekspresikan, dan merespons kenyataan sosial disekitar mereka.
7. Pemahaman hubungan konflik sosial dan budaya tidak hanya satu pertanyaan sensitif dari kesadaran, tetapi lebih jauh petualangan yang dalam dari penemuan dan penggalian arkeologis dari pengetahuan umum bersama dari sekelompok orang.

Untuk mengetahui konflik lebih mendalam maka dapat dibedakan jenis dan tipe konflik itu sendiri, yaitu:

Pertama, dimensi vertikal atau “konflik atas” yang dimaksud dengan konflik ini adalah antar elite dan massa (rakyat). Elite di sini bisa para pengambil kebijakan ditingkat pusat (pemerintahan), bisa pula kelompok bisnis atau aparat militer. Hal yang menonjol dalam konflik ini adalah digunakannya instrument kekerasan Negara, sehingga timbul korban di kalangan massa (rakyat).

Kedua, konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi di kalangan massa (rakyat) itu sendiri seperti konflik antar agama, khususnya antar kelompok

agama islam dan kelompok agama nasrani (protestan dan katolik) selain itu konflik antar suku.⁴⁹

Selain jenis konflik, ada pula pembagian dalam tipe konflik yang memberikan gambaran tentang sikap, perilaku, dan situasi yang ada. Tipe-tipe konflik terdiri dari tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik dipermukaan oleh Fisher, adapun penjelasannya yaitu:⁵⁰

1) Tanpa Konflik

Menggambarkan situasi yang relative stabil, hubungan-hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai. Tipe ini bukan berarti tidak ada konflik berarti dalam masyarakat, akan tetapi ada beberapa kemungkinan atas situasi ini. Pertama, masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah kearah konflik kekerasan. Kedua, sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjauhi permusuhan dan kekerasan.

2) Konflik laten

Yaitu suatu keadaan yang didalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa di tangani.

3) Konflik terbuka

⁴⁹ *Ibid*, h. 92.

⁵⁰ Novri Susan, *op.,cit.*, h. 92-93.

Dimana situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.

4) Konflik di permukaan

Memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat di atasi dengan meningkatkan komunikasi (dialog terbuka).

F. Kebebasan Beragama

Berkaitan dengan masalah agama dan beragama, setiap individu mencerminkan diri sebagai makhluk otonom. Beragama sebagai masalah pilihan jalan hidup, baik menentukan berada diatas rel kebaikan maupun keburukan, bukan secara otomatis dan *taken for granted* terjadi. Hal ini merupakan dimensi etika rasional, untuk apa sebuah keputusan dipilih.

Mempertimbangkan otonomi dan kebebasan manusia dalam membawa arah kehidupannya secara individual, Allah menyatakan jaminan atas kebebasan memilih beragama atau tidak beragama. Dalam sebuah ayat dinyatakan:

“sesungguhnya kami telah memberi manusia suatu jalan, ia dapat memilih beriman maupun kufur” (Q.S. al-insan 76:3).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberi dua macam petunjuk kepada jalan lurus dan kesesatan atau kebaikan dan keburukan.manusia dengan otonomi akal nya diperkenankan untuk memilih. Jika ia menghendaki

untuk beriman dan beragama, maka ia akan memilih beragama dan beriman (*shaakir*). Sebaliknya jika ia menghendaki untuk tidak beriman atau tidak beragama, maka jadilah ia tidak beriman dan beragama⁵¹.

Dalam konsep Negara pancasila mengenai kebebasan beragama, dapat diuraikan secara hirarki sebagai berikut⁵²:

1. Sila pertama pancasila

Sebagai dasar pertama, ketuhanan yang maha esa bukan saja meletakkan dasar moral diatas kesatuan nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (ketuhanan yang maha esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama, karena agama adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha *nation-building*.

2. Pasal 28 dan 29 UUD 1945

Dalam amandemen undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pasal 28E merumuskan bahwa:

- 1) Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan memeluk kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 29 ayat (2) menentukan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan menurut agamanya dan kepercayaanya itu.

⁵¹ Zakiyuddin Baidhawi., *Kredo Kebebasan Bergama*. (Jakarta: PSAP, 2006), h. 37-38.

⁵² Mirza Nasution dan Iman Pasu Purba., *Jaminan Kehidupan Beragama dalam Konstitusi*, (Jakarta: Sofmedia, 2013), h. 68.

3. UU no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 22 ayat (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 22 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

4. UU no 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan

Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik:

Yaitu pada Pasal 18 ayat (1) setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik ditempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Ayat (2) tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. (3) kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain. (4) Negara-negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orangtua, jika ada wali, wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

G. Gambaran Umum Tentang Front Pembela Islam (FPI)

Ketika terjadinya proses reformasi, hampir tidak ada kekuatan sosial dominan yang bisa mengendalikan gerakan masyarakat. Bahkan, aparat negara juga tidak memiliki peran yang efektif untuk menjalankan fungsinya sebagai penjaga ketertiban sosial masyarakat. Yang terjadi adalah munculnya anarki sosial, yang ditandai dengan maraknya kerusuhan diberbagai lapisan masyarakat. Setiap elemen masyarakat pada saat itu memiliki kesempatan untuk melakukan konsolidasi, membentuk kelompok-kelompok sosial guna mengekspresikan kepentingan masing-masing.

Dalam suasana dimana kekuasaan yang ada tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif, setiap kelompok dapat secara bebas memperjuangkan dan mengekspresikan kepentingannya, sekalipun harus bertentangan dengan aturan hukum. Konflik sosial yang diwarnai dengan berbagai tindakan kekerasan terjadi dimana-mana, mulai Aceh, Ambon, Irian, Poso, hingga Sanggau Ledo-Pontianak. Ada semacam tindakan balas dendam yang dilakukan oleh masyarakat terhadap negara dan juga terhadap kelompok sosial lainnya yang dianggap sebagai bagian dari negara. Reformasi merupakan arus balik gerakan sosial dari dominasi kekuatan negara pada kekuatan rakyat.

Oleh karena itu tiadanya situasi yang kondusif yang tiadanya proses sosialisasi dan konsolidasi yang memadai, terjadinya arus balik ini tidak menyebabkan timbulnya iklim sosial politik yang kondusif bagi tumbuhnya

demokrasi dan justru sebaliknya, menjadi ajang balas dendam yang melahirkan konflik dan kekerasan sosial. Masing-masing kelompok saling berebut kepentingan dengan menjadikan reformasi dan demokrasi sebagai legitimasi bagi tindakan mereka masing-masing. Sekelompok masyarakat pada masa orde baru merasa ditindas dan dirampas hak-haknya serta diperlakukan secara tidak adil oleh negara, pada era reformasi mereka bangkit dan melakukan perlawanan untuk merebut kembali hak-hak mereka yang terampas. Sebaliknya, kelompok yang dulunya menjadi bagian dari negara berusaha menggunakan proses reformasi semaksimal mungkin untuk menghilangkan jejak dengan cara menyamar menjadi pejuang reformasi dan demokrasi.

Umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini, merasa bahwa reformasi adalah momentum yang sangat tepat untuk merebut posisi penting dalam kekuasaan. Ketika proses reformasi terjadi, sebagian umat Islam menggalang kekuatan untuk mengambil peran politik yang lebih strategis. Dengan hilangnya kekuatan dan aparturnya, umat Islam memiliki kesempatan untuk menawarkan nilai-nilai Islam sebagai alternatif untuk menjawab problem bangsa tanpa harus khawatir dicurigai sebagai kelompok ekstrim kanan (kelompok fundamentalis) yang harus diberantas. Bahkan mereka merasa bangga dengan sebutan-sebutan tersebut.

Selain karena alasan tersebut, bangkitnya kekuatan Islam jenis ini juga didorong oleh suatu keinginan untuk menjaga dan mempertahankan martabat

islam dan sekaligus umat Islam. Umat Islam tampaknya selalu bernasib kurang baik, selalu menjadi korban dari tatanan sosial yang ada, maka untuk menjaga martabat dan wibawa Islam, kelompok ini memandang perlu melakukan konsolidasi kekuatan Islam guna membela umat Islam yang diserang oleh kelompok lain. Atas dasar ini, lahirlah laskar-laskar Islam. Laskar-laskar ini banyak melakukan pelatihan kemiliteran untuk memberi perlindungan kepada umat Islam di daerah-daerah konflik dan untuk memberantas kemaksiatan.

Akhirnya, Pada 17 Agustus 1998, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-53, sejumlah ustadz, kyai, dan ulama, sebagian besar dari Jabotabek, berkumpul di pesantren al-Umm Ciputat, Tangerang. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperingati dan mensyukuri nikmatnya kemerdekaan sekaligus membicarakan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, mulai dari ketidakadilan sampai dengan hak asasi manusia, dimana sebagian besar yang menjadi korban adalah umat Islam. Di antara mereka yang hadir adalah K.H. Cecep Bustomi, Habib Idrus Jamalullail, K.H. Damanhuri, Habib Muhammad Rizieq Syihab, dan K.H. Misbahul Anam, yang menjadi tuan rumah. Dalam pertemuan inilah dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk sebuah wadah yang bertujuan menampung aspirasi umat sekaligus mencari solusi terbaik atas persoalan-persoalan diatas. Dan pertemuan tersebut dianggap sebagai hari kelahiran FPI.

Pemilihan nama "Front Pembela Islam" untuk organisasi yang baru dibentuk ini memiliki makna tersendiri. Kata "Front" menunjukkan bahwa organisasi ini selalu berusaha untuk berada di garis depan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah perjuangan. Kata "Pembela" mengisyaratkan bahwa organisasi ini akan berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak Islam dan umat Islam. Sementara kata "Islam" mencirikan bahwa perjuangan organisasi tidak terlepas dari ikatan ajaran Islam yang lurus dan benar. Dengan nama "Front Pembela Islam", organisasi ini membela "nilai" dan "ajaran", bukan orang atau kelompok tertentu. Artinya, sebagaimana dikatakan Habib Rizieq, pendiri sekaligus ketua FPI, sangat mungkin organisasi ini membela kelompok non-Muslim, karena menolong mereka adalah sebagian dari ajaran Islam.

Situasi sosial-politik yang melatarbelakangi berdirinya FPI dirumuskan oleh para aktivis gerakan ini sebagai berikut:

- *Pertama*, adanya penderitaan panjang yang dialami umat Islam Indonesia sebagai akibat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa.
- *Kedua*, adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam.
- *Ketiga*, adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Dengan mencermati faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya FPI maka tampak jelas bahwa kelahiran FPI tidak bisa lepas dari peristiwa reformasi sebagai momentum perubahan sosial politik di Indonesia .Dengan demikian,keberadaan FPI merupakan bagian dari proses pergulatan sosial-politik yang terjadi di era reformasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pembahasan ini akan menjelaskan beberapa aspek, yakni: lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan pertimbangan di wilayah Indonesia Timur, menjadi tempat penelitian karena dari berbagai wilayah, Makassar salah satu tempat yang paling banyaknya aksi yang dilakukan organisasi Front Pembela Islam (FPI) . Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama dari penulis, sehingga memfokuskan penelitian di wilayah tersebut. Untuk lokasi yang lebih spesifik, berupa kecamatan atau kelurahan, akan disesuaikan dan ditentukan pada saat penulis sudah berada di lokasi penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian di golongan sebagai data sekunder.⁵³

⁵³Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 24.

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan. Informan yang dimaksud disini adalah orang-orang yang berhubungan dekat dengan Organisasi Masyarakat Front pembela Islam (FPI).

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi penelitian.

Prof. Peter Mahmud Marzuki menguraikan kedua bahan tersebut terletak pada bahan hukum primer. Bahan hukum primer bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁵⁴

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks. Karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁵⁵

⁵⁴Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2008), h. 41.

⁵⁵ *Ibid.* h. 142

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang dijadikan acuan untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam

Dalam wawancara ini, penulis secara langsung berkomunikasi dengan key informan terpilih yang dianggap paham dengan apa yang akan diteliti, yaitu mengenai visi dan misi ditinjau. Pencarian data dengan wawancara dilakukan dengan mendatangi sekretariat Front Pembela Islam Makassar, Sulawesi Selatan, wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa tokoh yang dianggap mempunyai informasi mengenai orientasi Jihad Organisasi masyarakat Front Pembela Islam ditinjau dari sosiologi hukum.

2. Study Pustaka

Penulis memperoleh pengetahuan baik tentang teori maupun data-data dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan tak lupa pula membaca literatur lain yang berhubungan erat dengan judul yang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan diolah dan dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif sedangkan data yang dikuantifikasi, dianalisis

secara kuantitatif dengan menggunakan analisis prosentase dengan melihat aksi Organisasi masyarakat Front Pembela Islam. Analisa ini bertujuan agar temuan-temuan dari kasus-kasus yang terjadi dilokasi penelitian dapat lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara terperinci. Sehingga apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian akan terjawab dengan maksimal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan sepak terjang front pembela islam (FPI) sebagai sebuah gejala sosial hubungannya dengan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian dekskriptif (*deskriptif research*), yakni sebuah penelitian yang memberikan gambaran lebih mendalam tentang gejala-gejala sosial tertentu atau aspek kehidupan tertentu pada masyarakat yang diteliti dalam konteks ini FPI. Front pembela islam (FPI) merupakan ormas islam yang dikenal cukup luas dimasyarakat khususnya di kota Makassar. Hal ini disebabkan karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh FPI cenderung menonjolkan kekerasan dalam memberantas kemaksiatan atau merazia tempat-tempat hiburan serta penolakan terhadap kelompok yang dianggapnya sesat.

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian penulis sebagai sebuah jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I tulisan ini adalah “Bagaimanakah Tinjauan sosiologi hukum terhadap eksistensi Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di Kota Makassar?”. Selain masalah tersebut, masalah lain yang

juga dideskripsikan dalam Bab ini adalah “Upaya apakah yang dapat ditempuh untuk menangani aksi organisasi masyarakat Front Pembela Islam dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di Kota Makassar?”.

Adapun tinjauan yang digunakan dalam membahas objek yang telah diteliti adalah secara umum penulis menggunakan tinjauan sosiologi hukum, dimana di dalam tinjauan tersebut, penulis mencoba untuk menggunakan teori-teori yang ada dalam kajian sosiologi hukum yang memiliki hubungan erat dengan masalah yang sedang dibahas.

1. Tinjauan Hukum Terhadap Eksistensi Front Pembela Islam (FPI) Sebagai Organisasi Masyarakat Dalam Kaitannya dengan Konflik Keagamaan di Kota Makassar.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sosiologi hukum merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial, maka dalam pembahasan ini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama maka point awal yaitu penulis akan menguraikan Dinamika terbentuknya organisasi Front Pembela Islam (FPI) di kota Makassar. Selanjutnya, penulis akan menguraikan orientasi gerakan Front Pembela Islam. Dan terakhir penulis akan menguraikan hubungan Undang-Undang Ormas terhadap keberadaan FPI.

1.1 Dinamika Terbentuknya Organisasi Front Pembela Islam (FPI) Di kota Makassar.

Membahas Front Pembela Islam (FPI) berarti membahas organisasi massa yang bukan hanya terletak disatu daerah saja, namun lintas

gerakannya merambah sebagai organisasi berskala nasional yang jumlahnya sudah mencapai 22 cabang diseluruh penjuru tanah air. Dalam kemunculannya, Front pembela islam (FPI) yaitu disekitar fase reformasi politik di Indonesia lebih tepat jika dipahami dalam konteks reaksi terhadap Negara yang sedang lemah, baik oleh serbuan kapitalisme global maupun karena ambruknya orde baru, yang kemudian tengah berproses menuju demokratisasi. Lemahnya Negara bisa dilihat dari inkonsisten Negara dalam proses penegakan hukum dan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, sejak tahun 1998 hingga saat ini. Di sisi lain, pengalaman politik orde baru yang represif dan cenderung tidak menghormati hak asasi manusia meninggalkan duka dan kekecewaan yang mendalam dihati umat islam. Sulit untuk disangkal, kelompok yang menjadi korban kebijakan politik berasal dari kalangan muslim⁵⁶.

Disamping aspek historis di atas, realitas sosial juga memberikan kontribusi penting dalam melahirkan reaksi umat islam. Premanisme, perjudian, pelacuran, pornografi, dan segala bentuk kemungkaran yang dilarang agama berkembang bebas tanpa kontrol yang berarti dari aparat hukum. rentetan kekecewaan dan realitas sosial tersebut menimbulkan implikasi tersendiri dalam cara umat islam menilai dan menyikapi Negara. Maka, muncul kemudian inisiatif sekelompok warga untuk menegakkan hukum tersebut menurut cara dan kepentingan mereka sendiri. Gagasan

⁵⁶ Andri Rosadi., *hitam putih FPI*, (Jakarta: nun publisher, 2008), h.201

mengenai adanya kontrol sosial terhadap perilaku individu/masyarakat yang menganut paham kolektif/komunal. Dalam masyarakat komunal, biasanya terdapat pemimpin yang menjadi pusat kuasa dan pengaruh, yang menggerakkan para pengikutnya untuk melakukan sebuah aksi. Habib Rizieq berada dalam posisi ini sebagai pusat dalam acuan pimpinan⁵⁷.

Selain hal di atas, penggunaan kata Islam dalam nama organisasi secara jelas menunjukkan bahwa FPI merupakan organisasi keagamaan. Islam, bagi anggota FPI, di samping berfungsi sebagai identitas yang harus dijaga dan dibela, juga merupakan satu-satunya solusi. Mereka sangat yakin, problema masyarakat dan Negara akan selesai jika syariat Islam diterapkan. Karena itu FPI akan terus berjuang menegakkan syariat. Salah satu cara untuk menegakkan syariat adalah dengan menegakkan *amar makruf nahi munkar*. FPI memiliki paradigma tersendiri mengenai *amar makruf nahi munkar* ini. Mereka berpandangan, makruf harus ditegakkan, sementara mungkar harus dilarang. Dalam aksi mencengah dan melarang kemungkaran, sering terjadi resistensi yang berujung pada konflik dan kekerasan. Dari fakta ini, kemudian FPI menyimpulkan bahwa penegakkan nahi munkar tak bisa menghindari kekerasan. Karena itu, penggunaan kekerasan dalam tataran tertentu diperbolehkan. tabel di bawah ini memberikan gambaran lebih ringkas:

⁵⁷ *ibid*

Tabel 1.1. Kategori Perbuatan Dan Balasannya

Perbuatan	Konsep islam	kehidupan	Balasan di dunia	Balasan di akhirat	Tempat di akhirat
Baik	Makruf	Dunia	Berkah/Azab	Pahala	Surga
Buruk	Munkar	Akhirat	Bencana	Dosa	Neraka

Sumber: Dokumentasi FPI

Logika-logika di dalam FPI mengklasifikasikan perbuatan menjadi dua: makruf dan munkar; kehidupan juga dua: dunia dan akhirat; *reward* juga dua: bencana di dunia dan neraka di akhirat, atau bencana di dunia dan dosa/neraka di akhirat. Digunakannya argumentasi dari teks suci menandakan mereka adalah kalangan agamawan dan gerakannya merupakan gerakan keagamaan. FPI didasarkan pada fakta lapangan di kota Jakarta, bahwa organisasi ini cukup konsisten melakukan aksi massa di antara organisasi islam lainnya. Di antara aksi-aksi FPI adalah pada peristiwa Ketapang (1998); Perang Cikijing (2000); demonstrasi menuntut pemberlakuan syariat islam di depan gedung DPR dengan semboyan “Lebih Baik Mati Membela Syariat Daripada Hidup Tanpa Syariat” (2002); Demonstrasi Menuntut Pengunduran Diri Presiden Megawati (2002); Penentangan Kontes Waria di Sarinah, Jakarta (2005); Penyerangan Terhadap Kampus Mubarak Aliran Muhammadiyah di Parung, Bogor (2005); Ancaman Serangan Terhadap Kantor Jaringan Islam Liberal (JIL) di Utan Kayu, Jakarta (2005); Demostrasi Dan Pengrusakan Kedutaan Besar

Amerika Serikat Di Jakarta; Dan Pengrusakan Kantor Majalah *Playboy* (2006)⁵⁸.

Dalam perjalanan sejarah FPI terjadi *turning point* saat peristiwa penangkapan Habib Rizieq oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 20 April 2003 yang merupakan sentrum acuan kepemimpinan, dalam kasus pelecehan terhadap institusi kepolisian. Peristiwa ini berawal dari dialog stasiun televisi SCTV dan Trans TV antara Habib Rizieq dan wakil pihak kepolisian. Dalam dialog tersebut, ada beberapa komentar dan pernyataan Habib yang bernada melecehkan institusi kepolisian. Komentar inilah yang menggiringnya berurusan dengan kepolisian setelah dialog. Ia kemudian divonis 7 bulan penjara. Ketika ia dipenjara, Laskar FPI dibekukan oleh para pengurus DPP FPI untuk kepentingan evaluasi dan pembenahan yang berdampak kevakuman aksi dan diganti dengan pengajian dan tabliq untuk meningkatkan kualitas keagamaan anggota. Pada fase inilah terjadi konsolidasi internal tubuh FPI, dengan memikirkan kembali strategi gerakan dan citra organisasi. Pada fase ini jugalah terjadi ekspansi FPI ke daerah, karena kekecewaan terhadap perkembangan FPI di kota Jakarta⁵⁹.

Sementara itu, kehadiran FPI dalam ruang lingkup Kota Makassar merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan latar belakang sosial di atas. Dalam melegitimasi ekspansi FPI ke daerah-daerah maka

⁵⁸ *Ibid.* h. 27

⁵⁹ *Ibid.* h. 200

dirangkailah dalam AD/ART Front Pembela Islam. Atas dasar itu, maka secara kelembagaan dibentuklah struktur kepengurusan FPI dari pusat sampai ke tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di wilayah Indonesia, bahkan dibentuk pula Dewan Pimpinan di luar negeri.

Kepemimpinan dan struktur organisasi FPI tersebut secara jelas di muat di dalam pasal 10 Anggaran Dasar FPI, yakni:

- a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat Pusat terdiri dari Imam Besar, Majelis Syura dan Dewan Tanfidzi.
- b. Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) di luar negeri terdiri dari Imam, Majelis Syura dan Dewan Tanfidzi.
- c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Provinsi terdiri dari Imam, Majelis Syura dan Dewan Tanfidzi.
- d. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat Kota/Kodya/Kabupaten adalah Dewan Tanfidzi Wilayah.
- e. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan adalah Dewan Tanfidzi Cabang.
- f. Dewan Pemimpin Ranting (DPRa) di tingkat Kelurahan/Desa adalah Dewan Tanfidzi Kelurahan.

Dari gambaran kepemimpinan dan struktur organisasi FPI serta eksistensi FPI yang berskala Nasional, maka secara normatif (sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPI), maka Kota Makassar sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dan identitasnya

sebagai sebuah Kota Madya, maka wajib untuk dibentuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Perintah untuk membentuk DPW, termasuk DPW di Kota Makassar merupakan kewajiban Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPI dalam pasal 11 Point 7 huruf a menjelaskan bahwa Dewan Pimpinan Daerah wajib membentuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh Daerahnya.⁶⁰

Sementara itu, secara historis sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdur Rahman⁶¹ bahwa sejarah masuknya Front Pembela Islam (FPI) di kota Makassar yaitu tepatnya pada tahun 2005 yang dibawa oleh Habib Machmud bin Umar alhamid. Pertemuan awal dan deklarasinya di kompleks unhas lama Jl. Sunu, Kota Makassar yang dihadiri ketua umum dewan pimpinan pusat (DPP) Front Pembela Islam (FPI) Habib M. Rizieq Shihab dan beberapa tandfizi DPP FPI.

Front Pembela Islam (FPI) di Makassar sendiri sudah berjalan 5 (lima) tahun dengan metode dakwah Dzikir, Taklim dan Tabligh. Pada tahun 2010 untuk ketua DPD Front Pembela Islam (FPI) Sulawesi Selatan diamanahkan kepada Habib M. Reza Alhamid yang di deklarasi 2010 di masjid Al-Markas, Makassar oleh ketua umum Habib M. Rizieq Shihab (Dewan

⁶⁰ Draft Lampiran Ketetapan Musyawarah Nasional III Front Pembela Islam (MUNAS III FPI) Nomor: TAP/03a/MNS-III/FPI/SYAWAL/1434 H tentang Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar Front Pembela Islam, hal. 14.

⁶¹ Pimpinan Laskar pembela islam FPI kota Makassar . *wawancara*, pada tanggal 19 januari 2014 di sekretariat Front Pembela Islam (FPI)

Pimpinan Pusat). Namun, tak lama kemudian terjadi pengalihan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Menurut Abdur Rahman bahwa pergantian itu dilakukan setelah musyawarah di mana adanya ketidaknyambungan antara ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan anggota front pembela islam, para anggota menganggap bahwa ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang dipengang oleh Habib M. Reza Alhamid ini sangat dekat dengan para umaro' (pemerintah). Front Pembela Islam (FPI) dijadikannya ajang bisnis sehingga dari alasan tersebut ketua Dewan pimpinan daerah dialihkan kepada Habib Muchin bin Dja'far Al-habsy hingga kepengurusan sekarang ini.

Dari gambaran tentang adanya pergantian pimpinan yang disebabkan kedekatannya dengan umaro' (pemerintah) tersebut di atas, nampak jelas bahwa FPI sebagai sebuah Ormas memposisikan diri sebagai organisasi yang enggan untuk berselingkuh dengan kekuasaan (pemerintah). Dalam artian, FPI sebagai sebuah Ormas hadir sebagai pengontrol kinerja Pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang pernah diungkapkan oleh Pimpinan Pusat FPI, yakni Habib Rizieq. Menurut beliau, posisi FPI menjadi semacam *Pressure Group* di Indonesia, untuk mendorong berbagai unsur pengelola Negara agar berperan aktif dalam memperbaiki dan mencegah kerusakan moral dan akidah umat Islam, serta berinisiatif

membangun suatu tatanan sosial, politik dan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.⁶²

Selain uraian di atas, berdirinya FPI sebagai lembaga/organisasi kemasyarakatan, pada dasarnya jika ditinjau dari esensi manusia sebagai makhluk sosial, maka hal tersebut merupakan sebuah wujud nyata dalam mengejawantahkan esensi manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berkerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam artian berdirinya lembaga/organisasi di tengah-tengah kehidupan sosial merupakan gejala alamiah manusia dalam merespon segala hal yang ada disekelilingnya hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapainya.

Menurut Herbert G. Hicks dua alasan mengapa orang memilih untuk berorganisasi: *Pertama*, alasan Sosial (social reason), sebagai “zoon politicon ” artinya makhluk yang hidup secara berkelompok, maka manusia akan merasa penting berorganisasi demi pergaulan maupun memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat kita temui pada organisasi-organisasi yang memiliki sasaran intelektual, atau ekonomi, *Kedua*, alasan Materi (material reason), melalui bantuan organisasi manusia dapat melakukan tiga macam hal yang tidak mungkin dilakukannya sendiri, yaitu dapat memperbesar kemampuannya, dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu sasaran, melalui bantuan sebuah organisasi dan dapat menarik

⁶² Mahmuddin, *Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 1*, April 2013, h. 91.

manfaat dari pengetahuan generasi-generasi sebelumnya yang telah dihimpun.⁶³

Fitrah manusia sebagai makhluk sosial tersebut yang menghendaki adanya kerjasama dalam mewujudkan tujuan yang sama, maka sebagai sebuah Negara modern (*modern staat*), dimana bercirikan adanya perlindungan hak-hak dari warga Negara, maka hak-hak tersebut harus dijamin oleh negara. Penjaminan akan pemenuhan hak tersebut di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia di atur di dalam konstitusi sebagaimana yang termaktub di dalam amandemen ke empat Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal Pasal 28 C tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28 E (2) tentang kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, (2) hak berserikat, berkumpul dan berpendapat. Pasal 28 F tentang hak berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi & lingkungan.

Penjaminan hak tersebut di atas, tentunya berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali warga Negara yang beragama non Islam. Wujud implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas dan pasca amandemen

⁶³ [#Alasan_Berorganisasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_sosial). diakses pada tanggal 23 januari 2014 pukul 20:11 WITA

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang No. 17 tahun 2013.

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 17 tahun 2013 menjelaskan bahwa Ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan Negara.

Kemudian, di dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 17 tahun 2013, dijelaskan bahwa Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jika dianalisis redaksi pasal-pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, eksistensi ormas termasuk di dalamnya adalah FPI sesungguhnya sangat memiliki peran penting dalam menciptakan suatu tatanan masyarakat ideal di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya tujuan bernegara. Namun, gambaran ideal sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Ormas tersebut di atas seakan hanya menjadi sebuah slogan semata, sebab kehadiran FPI sebagai ormas seakan merupakan bentuk antithesis dari apa yang diinginkan oleh Undang-Undang Ormas tersebut di atas. Pasalnya, hampir semua gerakan yang dilakukan

oleh Ormas FPI mengarah kepada tindakan anarkisme dan tak jarang merupakan bentuk tindak pidana. Tindakan yang dilakukan oleh kelompok Front Pembela Islam ini merupakan tingkah laku kolektif. Dalam teori Smelser bahwa dalam asas-asas tingkah laku kolektif dari komponen teori *social action*, memenuhi asas yang ketiga yaitu berwujud ledakan kebencian yang dimobilisir melalui tindakan kolektif atas nama kepercayaan umum yang menuntut tanggungjawab suatu pranata terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang tidak di inginkan. Atas nama kepercayaan umum dalam arti FPI menggunakan identitas islam sebagai wujud gerakan kepercayaan umum. Aksi FPI ini juga memenuhi asas keempat yaitu merupakan tindakan gila-gilaan dan kepanikan. Dalam hal ini setiap aksi/tindakan yang dilakukan FPI dapat dilihat pada tindakan pengrusakan objek⁶⁴.

Dari beberapa uraian di atas, maka dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁶⁵ Maka penulis berkesimpulan bahwa eksistensi FPI dalam dinamika terbentuknya front pembela islam sebagai sebuah lembaga/organisasi keberadaanya tidak terlepas dari gejala sosial yang ada saat itu. Gejala sosial yang dimaksud adalah hukum sebagai sebuah gejala sosial dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁶⁴ Achmad Ali, *op.cit*, h. 71

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

tidak dapat memberikan jaminan keadilan terhadap warga negaranya (khususnya terhadap umat Islam). Selain itu, hukum juga yang berlaku kala itu mengandung kelemahan dalam proses penengakkannya, bahkan ditinjau dari substansinya, hukum kala itu cenderung anti pati terhadap nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Padahal sebagaimana yang dikemukakan oleh Rosco Pound bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Sehingga atas dasar hal tersebut, ketika gejolak Reformasi berhasil mendobrak tirani kekuasaan Orde Baru yang menutup kran berekspresi dengan asas agama (termasuk Islam) dalam berlembaga, maka momentum tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya umat Islam yang tergabung dalam dewan pendiri Front Pembela Islam untuk mendirikan sebuah Ormas/lembaga yang berasaskan Islam.

Adapun orientasi dari Ormas FPI ini sebagaimana yang diuraikan di atas adalah melakukan Pressure terhadap pemerintah untuk mendorong berbagai unsur pengelola Negara agar berperan aktif dalam memperbaiki dan mencegah kerusakan moral dan akidah umat Islam serta berinisiatif membangun suatu tatanan sosial, politik dan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Selain itu juga, norma sosial yang digunakan oleh FPI dalam memperbaiki keadaan sosial yang ada, merupakan bagian dari norma/kaidah yang berlaku di dalam kehidupan sosial, yakni kaidah keagamaan.

Jadi FPI sebagai sebuah lembaga pada dasarnya latar belakang keberadaanya dipengaruhi oleh gejala sosial (hukum) yang kala itu gagal dalam menjalankan peran dan fungsinya di tengah tatanan sosial. Baik dari segi substansinya, hukum tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat, dari segi strukturnya, para penegak hukum lebih cenderung menjadikan hukum sebagai alat untuk melakukan represif terhadap masyarakat dan dari segi kultur tidak adanya kesadaran hukum masyarakat.

1.2 . Orientasi Gerakan Front Pembela Islam Kota Makassar.

Sudah menjadi diktum filosofis bahwa setiap sesuatu yang bergerak pasti memiliki titik tujuan, demikian pula dengan gerakan yang dilakukan oleh FPI. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa FPI merupakan sebuah Ormas yang berdirinya tidak terlepas dari gejolak sosial disekitarnya. Gejolak sosial ini adalah adanya ketidakadilan dan berbagai macam pelanggaran HAM yang mayoritas korbannya adalah umat Islam, serta tertutupnya kran kebebasan dalam menjalankan isi ajaran Islam secara kaffah (menegakkan *amar makruf nahi mungkar*).

Atas dasar hal tersebut, maka lahirlah Ormas FPI saat gejolak Reformasi bergulir di tanah air ini. Dengan demikian, maka sesungguhnya arah/orientasi gerakan FPI tidak terlepas dari dunia konteks dimana FPI itu dilahirkan. Selain itu, orientasi gerak an FPI ini juga tidak dapat dipisahkan dengan landasan ajaran yang terkandung dalam diri FPI itu sendiri, serta cita-cita yang hendak diwujudkan oleh FPI, yakni mewujudkan umat yang terbaik

(*khairu ummah*). Bagi FPI untuk menjadi umat yang terbaik, kaum muslim harus menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar (menyeruh kebaikan dan mencegah kemungkaran).⁶⁶ dan menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum dalam setiap aspek kehidupan. Jadi jika dipandang dari segi orientasi gerakan FPI, pada dasarnya FPI hendak mewujudkan umat terbaik dengan jalan menegakkan amar makhruf nahi mungkar di semua aspek kehidupan dengan berlandaskan syariat Islam. Dalam penegakan *Amar Makruf Nahi Munkar* dalam versi FPI maka dalam mendefinisikan Makruf dan Mungkar lebih ringkasnya dapat dilihat tabel bawah ini:

Tabel 1. 2. FPI Mendefinisikan Makruf Dan Mungkar

⁶⁶ Mahmuddin, *op., cit.*, h. 90-91.

Kategori mungkar	Kategori makruf
Ketidakadilan sosial Minuman keras Pelacuran Pornografi Perjudian Narkoba Praktik perdukunan Fitnah Premanisme Korupsi Permurtadan Penyimpangan aqidah Pelecehan agama Tak peduli pada agama Tak peduli pada nasib umat islam Penolakan pada nasib umat islam Komunisme Zionisme Nation state Sistem ekonomi sosialis/kapitalis Sekularisme Pluralisme Penculikan aktivis FPI Memilih partai non-Islam	Mewujudkan keadilan sosial Memberantas minuman keras Memberantas pelacuran Memberantas pornografi Memberantas perjudian Memberantas narkoba Menolak pratik perdukunan Memberantas premanisme Menghukum para koruptor Mencengah pemurtadan Mencengah penyimpangan aqidah Peduli pada agama Solider pada nasib umat islam Aplikasi syariat islam Menolak komunisme Menentang zionisme Negara islam Aplikasi ekonomi islam Menolak sekularisme Menolak pluralism Memilih partai islam Menyeru pada kebaikan Bakti sosial

Sumber: Dokumentasi FPI

Di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, Ormas FPI menempuh beberapa metode, yakni:

- a. Dalam menegakkan *amar ma'ruf* FPI mengutamakan metode lemah-lembut dengan langkah:
 - 1) mengajak dengan hikmah (ilmu dan amal)
 - 2) memberi *Mau'izhoh Hasanah*
 - 3) Berdiskusi dengan cara yang terbaik.

b. Dalam menegakkan *Nahi Mungkar* FPI mengutamakan metode tegas dengan langkah:

- 1) menggunakan kekuatan/kekuasaan bila mampu
- 2) Bila langkah pertama tidak mampu, menggunakan lisan dan pena
- 3) Bila kedua langkah tadi tidak mampu, menggunakan hati yang tertuang dalam ketegasan sikap.⁶⁷

Dari uraian metode yang digunakan oleh FPI di atas sebagai upaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, pada dasarnya nampak mencerminkan kecilnya peluang untuk terjadinya tindakan anarkis di dalam gerakannya. Hal ini semakin meyakinkan jika mencermati prosedur juang/aksi FPI dalam penegakkan nahi mungkar yang terdiri atas 10 langkah, yakni:

- a. laporan masuk. Laporan masuk disini sebagai informasi awal adanya kemungkaran di lingkungan sosial kemasyarakatan. Laporan masuk ini terbagi atas dua, yakni laporan aktif yang datangnya dari anggota, secara resmi tertulis dan laporan pasif yang datangnya dari masyarakat, secara resmi tertulis.
- b. Investigasi. Investigasi ini merupakan langkah selanjutnya setelah adanya informasi. Dalam melakukan investigasi, FPI mencari fakta dan menghimpun data untuk dijadikan bukti awal adanya pelanggaran hukum.

⁶⁷ Pasal 7 Anggaran Dasar Front Pembela Islam.

- c. Pemetaan wilayah juang. Pemetaan wilayah juang ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh FPI dalam membedakan wilayah kemaksiatan yang didukung oleh masyarakatnya dan wilayah kemaksiatan yang ditolak masyarakatnya.
- d. Laporan keluar. Laporan keluar ini merupakan tindak lanjut dari tahapan aksi FPI. Laporan keluar ini berupa penyampaian adanya kemaksiatan/adanya pelanggaran hukum yang ditujukan kepada ulama (tokoh Islam, Ormas Islam, dan Parpol Islam setempat) serta kepada umara/pemerintah (pejabat sipil, TNI dan POLRI, wakil rakyat setempat).
- e. Dialog. Dialog ini dilakukan oleh FPI dengan ulama dan umara (pemerintah)
- f. Demo. Langkah selanjutnya adalah melakukan demo/aksi dengan titik sasaran adalah tempat maksiat yang jadi penyakit masyarakat.
- g. Ultimatum. Ultimatum atau peringatan ini disampaikan kepada pemerintah (pejabat setempat yang berkuasa dan berwenang) dan targetnya adalah tempat maksiat yang jadi penyakit masyarakat.
- h. Inisiatif. Inisiatif ini terdiri atas tiga, pertama adalah melalui proses hukum, kedua adalah melalui lobi politik dan ketiga adalah aksi (melalui ruang public).
- i. Resiko
- j. Evaluasi.

Selain apa yang dijelaskan di atas, di dalam internal FPI sebagaimana yang dimuat di dalam Buku Panduan Diklat Khusus FPI, terdapat larangan aksi FPI. Larangan tersebut menyangkut:

- a. Dilarang melanggar hukum agama dan hukum Negara.
- b. Dilarang melakukan pelecehan, penganiayaan, pengrusakan, penjarahan, dan pembunuhan.
- c. Dilarang membawa/menggunakan senjata tajam/api dan bahan bakar/peledak.
- d. Dilarang melindungi, membela, member, meminta dan menerima bantuan apa pun dari tempat ma'siat atau pengusahanya.
- e. Dilarang melakukan aksi apa pun tanpa mengikuti prosedur standar aksi FPI.

Beberapa uraian terkait prosedur juang/aksi FPI serta larangan aksi FPI tersebut di atas nampak adanya suatu norma yang mengatur perilaku anggota FPI dalam melakukan aksinya untuk mencegah kemungkaran. Dan jika hal tersebut berjalan secara maksimal, maka sesungguhnya tidak akan muncul tindakan-tindakan anarkis bahkan tidak akan terjadi tindakan kriminal. Namun, dalam pelaksanaannya dilapangan, hal tersebut melenceng, bahkan yang terjadi justru sebaliknya.

Dalam wawancara penulis dengan Abdur Rahman (Pimpinan Laskar FPI kota Makassar), ketika penulis mempertanyakan adanya berita yang

ditampilkan oleh media terkait tindakan-tindakan FPI yang cenderung anarkis bahkan melanggar hukum. Abdur Rahman menjawab:

“Bahwa tindakan yang selalu diberitakan oleh media yang dianggap anarki itu tidak benar demikian namun hal tersebut merupakan tindakan ketegasan front pembela islam, karena apa yang dilakukan oleh front pembela islam ini melanjutkan apa yang dibenarkan oleh keputusan MUI bahwa adanya kelompok-kelompok sesat namun lebih kepada itu tindakan kami langsung berhadapan pada kelompok tersebut agar mereka menghentikan ajaran mereka yang menganggap diri islam namun keluar dari ajaran-ajaran agama islam. Lanjutnya sama hal dengan pemerintahan, mereka memiliki polisi dan tentara dalam keamanan Negara, begitu pun dalam naungan organisasi keagamaan bahwa adanya NU, Muhammadiyah, wahdah dan organisasi islam lainnya yang bertugas dalam berdakwah secara lisan untuk menyampaikan dan mengajak dalam kebaikan maka kami front pembela islam memposisikan untuk bertugas menuntaskan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan itu kami katakan dakwah nahi mungkar dengan istilah jihad di jalan Allah. swt. langkah itu pun kami ambil tidak langsung sewewenang tanpa melakukan proses diplomasi dulu, artinya kami dari FPI paham betul mengenai hukum maka dari itu sebelum kami melakukan aksi, kami menyurati pihak kepolisian yang bukan cuman sekali namun berkali-kali hingga sampai tak adanya respon maka kami FPI memutuskan menyelesaikan sendiri hal yang kami anggap tidak sesuai dengan norma kehidupan beragama seperti peneggeebekan penjual minuman keras yang merejalela dikota Makassar tanpa adanya kepedulian dari pihak kepolisian.

Mencermati jawaban yang dikemukakan oleh Abdur Rahman terkait pertanyaan penulis, nampak adanya pengingkaran bahwa FPI dalam melakukan aksinya tidak melakukan anarkisme. Kalau pun media memberitakan bahwa FPI melakukan anarkisme, maka hal itu bukanlah anarkisme/pelanggaran hukum melainkan ketegasan FPI. Dalam konteks ini, nampaknya sangat ganjil. Keganjilan tersebut adalah benarkah FPI tidak anarkis/melanggar hukum dalam melakukan aksinya? Tentu jawaban dari

pertanyaan ini akan bersifat negatif. Dalam artian tidak benar jika tindakan yang dilakukan oleh FPI dalam melakukan aksinya tidak anarkis.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap informan yang bernama Abd. Wahid Tahir yang peneliti wawancarai mengungkapkan:

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh FPI itu merupakan diluar dari toleransi beragama, kita ini berada di Negara hukum yang memiliki aturan-aturan yang mengatur soal permasalahan yang memiliki mekanisme dalam penyelesaiannya, maka tidak berhak oleh FPI melakukan aksi-aksi yang diikuti dengan aksi kekerasan dengan dalil kebenaran keyakinannya.⁶⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh informan lain yang bernama Jamaluddin peneliti wawancarai mengungkapkan:

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh ormas FPI melakukan tindakan-tindakan anarkis yang menurut pandangan ormas PFI itu melanggar aturan agama Islam serta unsur perombakan nilai-nilai yang berlaku yang unsurnya tidak pantas dalam bermasyarakat, yang bertentangan dengan faham mereka dengan dalil nahi mungkar, dengan melakukan perusakan. Hal ini bertentangan aturan hukum yang berlaku walaupun itu berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PFI.⁶⁹

Hal ini juga dibenarkan oleh informan lain bernama Ustadz Masykur yang peneliti wawancarai dari MUI Kota Makassar mengungkapkan:

Bahwa memandang keberadaan Front Pembela Islam (FPI) yaitu bahwa dalam satu sisi baik karena memiliki harapan dan keinginan bagaimana kemungkaran itu tidak merajalela, disisi lain bahwa adanya FPI itu membantu aparat dan sekaligus melakukan hal-hal pencegahan dalam menghalangi penodanaan Islam. Namun tindakan yang dilakukan dengan perusakan itu bertentangan dengan konsep Islam sebagai agama rahmatan lil alamin serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yakni tidak boleh main hakim sendiri dengan dalil apapun.⁷⁰

⁶⁸Dr. Abd. Wahid Tahir, M.Ag. Ketua Tanfidziah NU, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2014 disekretariat NU

⁶⁹Ustadz Jalaluddin, Pimpinan Muhammadiyah Kota Makassar, *Wawancara*, pada tanggal 15 Januari 2014 di sekretariat Muhammadiyah

⁷⁰Ustadz Masykur. Anggota Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, *Wawancara*, pada tanggal 16 Januari 2014 di kantor MUI kota Makassar.

Selain dari hasil wawancara dari para tokoh agama dan ormas Islam yang peneliti wawancarai di atas, juga dilengkapi dari data-data yang ada dalam tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3.
MATRIKS KASUS KEBEBASAN BERAGAMA DAN SITUASI
KEBERAGAMAAN DI SULSEL TAHUN 2011-2013

NO	KASUS	DESKRIPSI	LOKASI & WAKTU	PELAKU	KORBAN	TINDAKAN
1	Penyerangan ke sekretariat jamaah ahmadiyah indonesia (JAI) makassar.	Penyerangan tersebut dilakukan atas pandangan yang menganggap bahwa ahmadiyah adalah ajaran sesat	Makassar, 14 agustus 2011	FPI makassar	2 orang luka-luka (aktivis lbh)	Tuduhan sesat
2.	Razia terhadap warung makan yang buka pada siang hari pada bulan ramadhan.	Puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) Sulawesi Selatan menggelar razia terhadap warung-warung makan yang buka siang hari. Alasannya karena warung tersebut tidak menghargai dan menghormati umat islam.	Makassar, 8 agustus 2011	FPI Makassar	2 orang karyawan warung coto luka-luka	Razia warung makan
3.	FPI Cabang Makassar Himbau Tempat Hiburan Tutup Selama Ramdhan	Ratusan massa front pembela islam atau FPI menggelar razia ke sejumlah tempat hiburan dan panti pijat di kota Makassar sulawesi selatan dalam aksi kali ini mereka meminta agar perusahaan tempat hiburan untuk tutup di bulan ramadhan. Dalam oprasi kali ini ratusan massa dari FPI meng-	Makassar, 14 Juli 2012	FPI Makassar	Perusahaan Tempat Hiburan	Himbauan Intimidasi

		<p>gelar pawai di sepanjang jalan pengayoman boulevard dan panakkukang Makassar sulawesi selatan. Massa dari FPI ini menempelkan selebaran yang berisi himbauan di sejumlah tempat hiburan malam dan panti pijat untuk tutup selama bulan ramadhan. Aksi ini sempat diwarnai adu mulut lantaran pemilik salah satu panti pijat tidak terima dengan kedatangan massa FPI. Selain mendatangi tempat hiburan dan panti pijat FPI juga mendatangi sejumlah rumah makan di wilayah kecamatan Panakkukang Makassar untuk memberikan himbauan agar tutup selama bulan ramadhan.</p>				
4.	FPI sebut Pemkot dan Polisi Makassar lindungi pabrik miras	<p>Front Pembela Islam (FPI) Makassar menuding aparat Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Manggala dan Pemerintah Kota Makassar melindungi pabrik minuman keras (miras) yang beroperasi di pemukiman penduduk Antang, Kecamatan Manggala, Makassar. Pasalnya, beberapa kali digerebek FPI, pabrik PT Padi Mas itu tidak memiliki izin. Seperti dirilis <i>kompas.com</i>, Pabrik miras PT Padi Mas sudah beberapa kali digerebek oleh FPI dan DPRD Kota</p>	Makassar, 17 Juli 2012	FPI	Pamkot dan Polisi	Tuding an Penggr ebean

		<p>Makassar. Dalam penggrebekan tersebut, pemilik gudang PT Padi Mas, Ronald tidak bisa menunjukkan dokumen resmi maupun surat perizinan mendirikan pabrik miras di lokasi tersebut. Bahkan, sempat terjadi perseteruan antara anggota DPRD Kota Makassar dengan PT Padi Mas, Ronald terkait pendirian pabrik dan pemerasan. Terakhir, FPI kembali menggrebek pabrik tersebut yang ketiga kalinya pada Minggu (15/07/2012). Di situ FPI mengaku terpaksa bertindak lantaran aparat pemerintah Kota Makassar dan kepolisian terkesan tutup mata melihat kejadian tersebut.</p>				
5.	Pelemparan Klenteng	<p>Puluhan massa Ormas Islam ini dipimpin oleh Abdul Rahman melakukan baksi solidaritas untuk Umat Muslim Rohingnya di Myanmar yang dilakukan oleh FPI dan Gabungan Ormas Islam di Jalan Sulawesi, Kota Makassar, Jumat (10/8/2012). Mereka melakukan konvoi usai salat Jumat di masjid Al-Markaz Al-Islami. Sekitar pukul 14.45 Wita, konvoi berhenti di depan Klenteng Xian Ma. Di depan klenteng, Abdul Rahman pemimpin aksi melakukan</p>	Makassar, 11 Agustus 2012	FPI dan Gabungan Ormas Islam.	Ummat Budha Makassar	Penyerangan

		orasi. Dia mengancam akan merusak Klenteng jika Muslim Rohingya terus ditindas. Setelah itu, tanpa dikomando beberapa orang melempari batu ke arah klenteng				
6.	Penangkapan anggota ormas GAFATAR oleh FPI	Puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) Makassar menangkap empat orang anggota organisasi masyarakat (ormas) Fajar Nusantara yang diduga telah melakukan penistaan agama Islam. Keempat orang itu, lalu digelandang ke Mapolrestabes Makassar. Dalam laporannya, FPI menuding anggota ormas Fajar Nusantara melakukan penistaan agama dengan melarang anggotanya berpuasa dan salat lima waktu, serta tidak diwajibkan untuk menggunakan jilbab bagi kaum perempuan Muslim. Untuk membuktikan laporannya, anggota FPI juga memberikan Alquran dan sejumlah alat bukti yang didapat dari keempat anggota Fajar Nusantara yang ditangkap di Jalan Gunung Lompo Battang ke polisi. Seperti diketahui, ormas Fajar Nusantara merupakan salah satu ormas di Makassar yang bergerak di bidang so-	Makassar, 15 Oktober 2012	FPI	4 orang anggota ormas GAFATAR	Penangkapan

		<p>sial budaya, pendidikan, dan kesehatan. Ormas model ini, cukup banyak berkembang di Makassar. Namun, tuduhan FPI itu dibantah oleh anggota ormas Fajar Nusantara. "Tidak benar itu, organisasi kami tidak ada kaitan dan hubungannya dengan penistaan agama," ujar Asrul, salah seorang anggota ormas Fajar Nusantara di kantor polisi, Makassar, Senin (15/10/2012). Hingga kini, laporan FPI itu sedang ditangani oleh Mapolrestabes Makassar. Sementara anggota ormas Fajar Nusantara sudah diamankan guna penyelidikan lebih lanjut</p>				
7	FPI awasi konser NOAH	<p>Konser band Noah, yang akan digelar di Makassar 28 oktober mendatang, mendapat perhatian khusus dari Front Pembela Islam (FPI) Makassar. Panglima laskar FPI Makassar, Abdulrahman mengatakan bahwa pihaknya akan mengawasi dan memantau pelaksanaan konser Noah di Makassar. Baik pada saat konser maupun sebelum konser. Jika selama konser berjalan ada yang aksi-aksi yang dinilai melanggar norma keagamaan dan asusila, maka FPI akan langsung bertindak. Pihak FPI sendiri</p>	Makassar, 28 Oktober 2012	FPI	Band Noah	Intimidasi

		lanjut, Abdul Rahman akan turun langsung ke konser untuk memantau pelaksanaan konser tersebut.				
8	Penolakan Seminar Internasional Syiah	Ratusan Massa Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Wahdah Islamiyah beserta sejumlah Mahasiswa Islam mendatangi kampus Universitas Muslim Indonesia Makassar untuk menolak acara seminar Internasional "Persatuan Dunia Islam" yang diadakan oleh UMI Makassar bersama Kedutaan besar Iran untuk Indonesia.	Makassar, 5 November 2012	FPI, MMI, dan Wahdah Islamiyah	UMI dan Kedubes Iran untuk Indonesia	Penolakan dan penyerangan
9.	Pembubaran peringatan Asyura	Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) Sulawesi Selatan mencoba membubarkan peringatan Asyura yang diselenggarakan salah satu kelompok Syiah yaitu Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI). Peringatan Asyura' yang diselenggarakan di gedung Graha Pena, di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Jumat (23/11/2012) sekitar pukul 22.30 WITA malam ditujukan untuk memperingati secara berlebihan gugurnya cucu Nabi Muhammad, Sahabat Husein Bin Ali Radhiallahuanhu yang syahid di Karbala pada 10 Muharram di abad pertama tahun hijriyah.	Makassar, 23 November 2012	FPI	IJABI	Intimidasi

		<p>Peringatan itu menghardirkan pentolan IJABI, Jalaluddin Rakhmat. Kedatangan FPI Sulsel yang hendak merangsek masuk ke lantai II Graha Pena ternyata sudah diantisipasi oleh panitia dengan menurunkan seratusan anggota Polsek Panakukang dan Satuan Brimob Polda Sulsel yang bersenjata lengkap dan berhasil menghadang massa FPI. Massa FPI yang berhasil dihadang aparat ini kemudian menurunkan baliho-baliho milik kelompok Syiah yang dipajang di areal parkir depan Graha Pena sebagai bentuk penolakan. Setelah terjadi dialog dengan aparat dan diberi pengertian oleh Ketua LPPI Makassar, Ustadz Said Shamad, massa FPI Sulsel akhirnya membubarkan diri dan kembali ke markasnya, di jalan Sungai Limboto, Makassar. Tidak ada anggota FPI yang diamankan dalam peristiwa ini.</p>				
10.	Pengrusakan toko	<p>50 anggota Front Pembela Islam (FPI) mendatangi toko anugrah yang diduga menjual minuman keras, sehingga massa fpi melakukan sweeping terhadap toko tersebut. Kasus ini muncul sehari setelah video dalam situs you tube tentang tindakan oleh massa FPI yang tertangkap oleh cctv yang berjudul "a SHAME on 'front pembela islam'</p>	Makassar, 19 juli 2012	Front pembela islam (FPI) makassar	Toko anugrah Jl. Lagaligo	Pengrusakan took

		(FPI) Makassar attitude.				
11.	Penyerangan terhadap kelompok syiah pada perayaan asyura	Pukul 16.20 datangnya rombongan massa ber-konvoi dengan ken-daraan motor dan mobil berjumlah 100 orang berdatangan ke lokasi perayaan dalam komplek SMK Darussalam Jl. Perintis kemerdekaan km 19 Makassar, sambil membawa senjata tajam seperti parang, samurai, badik, balok serta busur-/anak panah, massa yang sebagian besar ciri-cirinya menggunakan pakaian jubah/-gamis, memakai sorban, celana diatas mata kaki, dengan cadar, mem-bawa bendera bertulis-kan la llaha ilallah berte-riak allahhu akbar, aliran sesat, kafir serta pada saat yang kemudian mengejar serta memukul dengan memaki bambu, kayu, potongan besi, skop, dan busur. Beda lagi perlakuan yang diterima oleh beberapa perempuan yaitu diteriakinya den-gan sebutan “pelacur, pezina, dan perempuan hina”. Bahkan salah satu tindakan yang lebih melampaui batas yaitu menarik jilbab salah se-orang ibu yang tengah mengendarai motor sampai sobek.	Makassar, 14 november 2013	Front pembela islam (FPI) makassar	1 korban luka parah dan 4 lainnya luka-luka memar	Tuduh an sesat

Sumber data: Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sul-Sel

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa adanya tindakan penyimpangan dari norma legal yang berlaku yaitu tindakan yang bersifat pengrusakan, penggerebekan, penyerangan dan penganiayaan yang dilaku-

kan oleh organisasi front pembela islam di kota Makassar. Selain data yang diperoleh dari lembaga advokasi dan pendidikan anak rakyat sulsel, data lain yang menunjukkan aksi FPI yang melanggar hukum adalah data dari kepolisian yang menangani kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FPI saat menggelar aksinya.

Tabel 1. 4.
Kasus Front Pembela Islam (FPI) Yang Pernah Ditangani Oleh Kepolisian.

No.	Berkas	Korban	Tersangka	Jenis Kasus	Penyidik
1.	Bp/199/IX/2011/Res Pasal 170, 351, 335 KUHP	Ahmad S/ 52 tahun/ BTN Ranggong A 10/6/Mks	Abdur rahman, S.H/ 47 tahun/ Jl. Sungai limboto No. 33/ Mks	Kekerasan, penganiayaan, melawan hak memaksakan kehendak orang lain.	AKP wahyu B. S.H/ AIPDA Nawir. S.H/ Brig. Fajar Asadi.
2.	Bp/198/IX/2011/Res Pasal 160, 335 KUHP	Rusli/29 tahun/ Kompleks PU. Kima 7/ Mks	Abdur rahman, S.H/ 47 tahun/ Jl. Sungai limboto No. 33/ Mks	Penghasutan dan melawan hak memaksakan kehendak orang lain	AKP wahyu B. S.H/ AIPDA Nawir. S.H/ Brig. Fajar Asadi.
3.	Bp/205/VI/2013/Res Pasal 406 KUHP	Toko Anugrah Jl. La Galigo Makassar	Aswar Anas/ 21 tahun/ Amiruddin/ 38 tahun/ Emir Faisal/ 45 tahun	Pengrusakan	AKP Sultan Iqbal. S.H/ IPPA/ Supriadi AIPDU A.Syamsul

Sumber: Reskrim POLRESTABES Makassar.

Kedua data tersebut di atas merupakan bukti empiris terkait masalah tindakan yang dilakukan oleh FPI dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang condong pada anarkisme/kekerasan. Tindakan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada dasarnya tidak terlepas dari gagasan/pemahaman yang ada di dalam diri Ormas FPI. Sebagai sebuah

Ormas yang menjadikan Islam sebagai asas Organisasi, FPI memahami bahwa seorang muslim harus menjalankan isi ajaran Islam secara kaffah. Selain itu, untuk dinyatakan telah menjalankan ajaran Islam secara kaffah, seorang Muslim harus berlomba-lomba untuk menjadi umat terbaik. Umat terbaik ini sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah umat yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, seorang muslim wajib melakukan jihad.

Tindakan anarkis yang dilakukan oleh FPI dengan dalil penegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dibenarkan. Sehingga dengan demikian, sesungguhnya tindakan FPI sebagai sebuah Ormas telah melenceng dari hakikatnya sebagai Ormas sebagaimana yang digariskan di dalam Undang-Undang. Selain itu juga, tindakan FPI tersebut telah mengambil alih tugas dan wewenang lembaga terkait, sehingga hal tersebut bukannya menciptakan ketertiban, Malah yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti pada informan yang peneliti wawancarai dari pihak kepolisian mengungkapkan:

Bahwa tidak dapat dibenarkan oleh seseorang atau masyarakat, ormas melakukan tindakan main hakim sendiri dengan dalil apapun karena itu melanggar aturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan negaralah yang mempunyai domain untuk memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar hukum tanpa mengenal status atau tanpa pandang bulu karena semua warga negara sama posisinya dimata hukum tak terkecuali organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI).⁷¹

⁷¹Muhammad Endro, S.IK., M.H., Kasat Reserse dan Kerminal Poltabes Kota Makassar, *Wawancara*, pada tanggal 20 Januari 2014 di kantor Poltabes Makassar.

Senada dengan hasil wawancara di atas, hal ini disampaikan oleh informan yang peneliti wawancarai dari sudut pandang psikologi hukum mengungkapkan:

Bahwa dalam memandang sesuatu aksi yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi hendaknya jangan dijustifikasi dalam perspektif *binner* benar atau salah tetapi harus dilihat terlebih dahulu akar masalahnya. Jika aparat keamanan dalam hal ini kepolisian tidak melakukan tindakan yang efektif dan tegas dalam menangani konflik horizontal dalam masyarakat.

Lebih lanjut mengungkapkan:

Bahwa tindakan-tindakan dilakukan oleh pihak FPI yang beberapa aksinya anarkis tidak dibenarkan, namun efek yang timbul dari aksi anarkis dalam pandangan psikologi hukum akan mempengaruhi para penentu kebijakan untuk melakukan suatu respon terhadap persoalan yang ada.⁷²

Konsepsi Jihad inilah yang menurut hemat penulis menjadi dasar sehingga dalam menjalankan aksinya untuk memberantas kemungkaran, anggota FPI seringkali terjebak dalam tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Padahal dalam memberantas kemungkaran tidak mesti dengan jalan kekerasan, apalagi di dalam konteks keindonesiaan, telah ada lembaga yang berwenang untuk itu. Sehingga dengan demikian, sesungguhnya tindakan FPI sebagai sebuah Ormas telah melenceng dari hakikatnya sebagai Ormas sebagaimana yang digariskan di dalam Undang-Undang. Selain itu juga, tindakan FPI tersebut telah mengambil alih tugas

⁷² Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, wawancara pada tanggal 5 Juni 2014 di Fakultas Hukum Unhas

dan wewenang lembaga terkait, sehingga hal tersebut bukannya menciptakan ketertiban, malah yang terjadi adalah sebaliknya.

1.3 Korelasi Undang-Undang Ormas dengan Eksistensi Front Pembela Islam.

Undang-Undang Ormas adalah seperangkat peraturan yang mengatur eksistensi Organisasi kemasyarakatan. Di Indonesia, payung hukum pertama untuk Ormas adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun, pasca bergulirnya Reformasi dan terjadinya amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tersebut tidak sesuai lagi dengan nafas reformasi dan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Sehingga atas dasar tersebut, maka Undang-Undang No. 8 tahun 1985 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan.

FPI sebagai sebuah Ormas, tentu juga menjadikan Undang-Undang No. 8 tahun 1985 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 sebagai dasar hukumnya. Dengan demikian, karena Undang-Undang No. 17 tahun 2013 merupakan payung hukum bagi setiap Ormas yang berada di Indonesia, maka setiap Ormas (termasuk FPI) harus tunduk dengan peraturan yang tertuang di dalam Undang-Undang tersebut. Ketundukan tersebut, baik dari segi persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah Ormas, maupun kewajiban-kewajiban serta larangan-larangan bagi sebuah Ormas dan lain-lain.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2013, Ormas diartikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jika dicermati pengertian Ormas yang tertuang dalam pasal 1 angka 1 tersebut, sesungguhnya terkandung makna bahwa setiap Ormas harus menjadi rekan kerja pemerintah baik berdasarkan suatu ikatan kerja sama atau pun tidak, untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selain pengertian Ormas yang dijelaskan di atas, di dalam pasal 21 Undang-Undang No. 17 tahun 2013 dengan tegas dinyatakan bahwa Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
 - d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
 - e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel;
- dan

- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara.

Tidak hanya kewajiban yang harus dilakukan oleh Ormas (termasuk FPI), Ormas juga berdasarkan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No. 17 tahun 2013 dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, rasa atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
- e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian pasal 21 dan pasal 59 ayat 2 di atas, nampak bahwa setiap Ormas termasuk FPI secara keseluruhan, maupun FPI DPW Kota Makassar berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, serta berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara. Selain itu, setiap Ormas (FPI) juga dilarang keras melakukan hal-hal yang dapat menciptakan ketidaktertiban di tengah-tengah kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara, melakukan tindakan permusuhan terhadap suku,

agama, ras, atau golongan, dilarang melakukan tindakan kekerasan, serta yang terpenting adalah dilarang melakukan kegiatan/tindakan yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.

Jika kaidah/norma hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tersebut di atas dijadikan sebagai patokan dasar dalam menilai tindakan/aksi yang dilakukan oleh FPI, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan/aksi yang dilakukan oleh FPI telah melenceng atau melanggar Undang-Undang Ormas. Hal ini dibuktikan dengan data-data yang telah diuraikan pada point 1.2 di atas. Olehnya itu, jika instansi terkait konsisten dalam menegakkan hukum, maka sudah semestinya harus dikenakan sanksi yang tegas tidak hanya oknum yang melakukan pengrusakan/kekerasan, melainkan juga harus dikenakan sanksi yang tegas terhadap FPI secara kelembagaan.

Adapun sanksi bagi Ormas yang melanggar pasal 21 dan pasal 59 tersebut di atas adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 61 Undang-Undang No. 17 tahun 2013, yakni:

- a. sanksi tertulis;
- b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Namun, norma hukum yang sudah cukup ideal tersebut di atas ternyata secara sosiologis hampir tidak memiliki keberlakuan. Pasalnya, FPI sebagai sebuah Ormas sampai saat ini masih tetap leluasa melakukan aksi dalam setiap kali melakukan aksinya sebagaimana yang tergambar dalam tabel di atas.

Jika beberapa uraian di atas (point 1.1, 1.2, dan 1.3) ditinjau dari optik sosiologi hukum, maka akan melahirkan suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya eksistensi FPI secara umum disebabkan oleh ketidakmampuan hukum dalam mewujudkan suatu tatanan yang adil, tertib dan tentram (khususnya bagi umat Islam). Ketidak mampuan hukum tersebut, baik dari segi substansi hukum maupun sturktur hukum (institusi penegak hukum). Sehingga atas dasar hal tersebut, FPI kemudian didirikan.

Namun, saat FPI berdiri dan menjalankan aktivitasnya sebagai Ormas, ternyata berdasarkan penelitian penulis pada FPI kota Makassar ditemukan bahwa FPI seringkali melakukan tindakan/aksi yang melenceng dari apa yang digariskan di dalam Undang-Undang Ormas. Tindakan yang melenceng ini jika penulis analisis berdasarkan penelitian penulis sesungguhnya disebabkan oleh:

- a. Doktrin yang ada di dalam internal FPI, yakni menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara berjihad, khususnya mengutamakan kekuatan/kekuasaan dalam menegakkan nahi mungkar (pasal 7 ayat 3 point a Anggaran Dasar FPI).

b. Tidak efektifnya hukum di dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat disimak dari komentar Abdur Rahman bahwa pada dasarnya sebelum melakukan tindakan/aksi dilokasi kemaksiatan, dan tempat-tempat yang lain, FPI terlebih dahulu menghubungi pihak yang berwenang (khususnya aparat kepolisian), namun karena tidak ada respon, maka FPI kemudian bertindak dengan menggunakan kekuatan.

2. Upaya yang ditempuh dalam menangani aksi organisasi Front Pembela Islam dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di Kota Makassar.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada point 1 di atas bahwa pada dasarnya eksistensi FPI dilatarbelakangi oleh adanya ketidak adilan, pelanggaran HAM yang banyak dialami oleh umat Islam, serta keinginan membangun sosial, politik dan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Spirit inilah yang kemudian mendorong FPI untuk lahir sebagai sebuah Ormas.

Atas dasar hal tersebut, maka FPI sebagai sebuah Ormas berupaya keras untuk menengakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah tatanan sosial, berbangsa dan bernegara (khususnya di Kota Makassar) yang tentunya memiliki landasan dalam doktrin Ormas FPI. Dalam menjalankan roda organisasi demi mencapai tujuannya, FPI menggunakan beberapa metode, yakni:

- a. menegakkan *Amar Ma'ruf* FPI mengutamakan metode lembut dengan langkah:
 - 1) Mengajak dengan hikmah (ilmu dan amal).
 - 2) Memberi Mau'izhoh Hasanah.
 - 3) Berdiskusi dengan cara yang baik.
- b. Dalam menengakkan Nahi Mungkar FPI mengutamakan metode tegas dengan langkah”
 - 1) Mengutamakan kekuatan/kekuasaan bila mampu.
 - 2) Bila langkah pertama tidak mampu, menggunakan lisan dan pena.
 - 3) Bila kedua langkah tadi tidak mampu, menggunakan hati yang tertuang dalam ketegasan sikap.

Terkhusus pada penegakkan nahi mungkar dengan metode kekuatan/kekuasaan tersebut, aksi atau gerakan FPI sering kali berujung pada kekerasan saat menghadapi golongan/kelompok/aliran yang dinyatakan sesat. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh FPI ini jika ditinjau dari Undang-Undang Ormas telah melenceng dari hakikat Ormas. Sebab, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa setiap Ormas berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Selain itu juga, Ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dan yang terpenting adalah Ormas dilarang melakukan tindakan yang menjadi wewenang pemerintah.

Yang menjadi titik sorotan penulis pada larangan di atas adalah larangan melakukan tindakan yang menjadi wewenang pemerintah. Hal ini hubungannya dengan (terutama) persoalan penodaan agama. Memang pada dasarnya, penodaan terhadap agama sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/ 1965, khususnya pada pasal 4 adalah dilarang, bahkan masuk di dalam delik pidana (pasal 156a). Namun, yang berwenang atas penindakan terkait masalah tersebut adalah aparat penegak hukum. Sehingga jika FPI kemudian melakukan perlawanan/aksi kekerasan kepada kelompok aliran sesat (yang melakukan penodaan agama), maka tindakan tersebut sesungguhnya telah melampaui kapasitasnya sebagai Ormas. Sebab, yang berwenang atas hal tersebut adalah aparat kepolisian.

Berdasarkan penelitian penulis saat mewawancarai Abdur Rahman terkait masalah tersebut, di dapatkan satu kesimpulan bahwa aparat penegak hukum cenderung melakukan pembiaran/tidak menindak lanjuti tindakan penodaan agama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Padahal menurut Abdur Rahman, pihak FPI sudah berkali-kali mengirimkan surat laporan. Sehingga atas dasar tersebut kemudian FPI bertindak sendiri yang mengakibatkan timbulnya konflik/kekerasan antar kelompok di Kota Makassar.

Menyimak persoalan tersebut, maka dalam upaya menjawab rumusan masalah yang kedua, penulis kemudian berdasarkan kronologi yang telah

diuraikan di atas, merumuskan upaya yang dilakukan untuk menangani aksi Ormas FPI dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di kota Makassar.

1.1. Upaya Preventif.

Upaya preventif adalah merupakan upaya pencegahan terhadap sesuatu sebelum sesuatu tersebut terjadi. Hubungannya dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka upaya preventif ini adalah upaya-upaya yang harus dilakukan demi tidak terwujudnya aksi FPI yang berefek pada lahirnya konflik keagamaan. Tentunya hal ini dilakukan dengan menggunakan optik sosiologi hukum.

Di dalam disiplin keilmuan hukum, hukum tidaklah dipandang sebagai satu-satunya kaidah yang bekerja di tengah-tengah kehidupan sosial, melainkan terdapat beberapa kaidah lain yang turut bekerja dalam kehidupan sosial demi terwujudnya tatanan sosial yang tertib dan aman. Kaidah-kaidah sosial lainnya tersebut sebagaimana diuraikan oleh Sudikno Mertokusumo adalah kaidah kepercayaan atau kaidah keagamaan, kaidah kesusilaan, dan kaidah sopan santun atau adat.⁷³ Semua kaidah yang ada tersebut termasuk kaidah hukum pada dasarnya memiliki dua fungsi, yakni membentuk perilaku masyarakat sekaligus mengukur/menguji apakah perilaku masyarakat sudah sesuai dengan yang selayaknya sebagaimana yang termuat di dalam kaidah/norma tersebut.

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Jogjakarta: Liberty, 2008), hal. 5.

Menyimak hal tersebut di atas, hubungannya dengan aksi/gerakan FPI (khususnya FPI Kota Makassar) yang cenderung menggunakan kekerasan dalam melakukan perlawanan terhadap kelompok atau aliran yang dianggap sesat, pada dasarnya bertindak berdasarkan kaidah/norma agama sebagaimana yang tertuang di dalam doktrin FPI, yakni menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan jalan jihad. Jihad ini di dalam ajaran agama (Islam) dipahami berbeda-beda oleh hampir masing-masing kelompok-kelompok Islam. Term jihad secara leksikal berasal dari kata *jahada*, *yujahidu*, *juhdan/jihadan* yang berarti “kekuatan, kemampuan, kesulitan, kelelahan, bersungguh-sungguh, berjihad, menguruskan, menguji, dan mengetes”. Secara etimologi, jihad berarti mengerahkan dan mencurahkan segala kemampuannya baik berupa perkataan maupun perbuatan. Secara terminologi, jihad berarti seorang muslim mengerahkan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memperjuangkan dan menegakan agama Allah demi mencapai ridha Allah Swt.⁷⁴

Dalam perkembangan masyarakat muslim selanjutnya, istilah jihad kemudian lebih dimaknai pada kegiatan politik yaitu perjuangan, tidak lagi pada konteks wilayah sosial dan privat. Setiap umat Islam melakukan perlawanan terhadap kezhaliman, maka mestilah selalu menggunakan kata “Jihad”. Sehingga atas dasar itu, maka konsep Jihad senantiasa dimaknai

⁷⁴ Mahmuddin, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 1, (Makassar, 2013), hal.93.

secara sempit dan berimplikasi pada lahirnya tindakan kekerasan/anarkisme yang bahkan terkadang melahirkan korban jiwa. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Hamuddin bahwa bagi gerakan Islam konsep jihad dimaknai sebagai perjuangan melawan dan menghancurkan kezhaliman. Perjuangan itu dapat berupa melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang tidak menjalankan syariat atau hukum-hukum Allah dengan cara seperti melakukan kegiatan terror juga dapat berupa penghancuran tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat untuk melakukan kemaksiatan.⁷⁵

Lebih lanjut, Mahmuddin menjelaskan bahwa makna jihad kemudian bergeser dan lebih dikenal dengan perjuangan menghancurkan kezhaliman tanpa mengenal ampun. Pengertian ini jelas nampak dalam berbagai aktivitas anggota beberapa kelompok Islam terhadap tempat-tempat judi dan hotel-hotel yang dianggap sebagai kemaksiatan.⁷⁶

Menyimak hal tersebut di atas, nampak bahwa konsep jihad yang ada dalam doktrin FPI lebih cenderung pada perjuangan dengan cara kekerasan, bahkan pengorbanan jiwa sebagaimana yang diungkapkan oleh Hamuddin di atas. Hal ini seakan dibenarkan jika kita menyimak fakta-fakta di lapangan dan menyimak lima prinsip perjuangan FPI, yakni:

- a. Allad Swt adalah Tuhan kami dan tujuan kami.
- b. Muhammad Saw adalah teladan kami

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 94.

⁷⁶ *Ibid.*

- c. Al-Qur'an adalah Imam kami.
- d. Jihad adalah jalan juang kami.
- e. Mati syahid adalah cita-cita kami.⁷⁷

Olehnya itu, dari sudut pandang ini, maka melakukan upaya preventif terkait masalah aksi Ormas FPI yang cenderung anarkis dalam menghadapi aliran yang dianggap sesat dan kelompok agama lain, serta tempat-tempat kemaksiatan adalah dengan cara memberikan peningkatan pemahan terkait masalah doktrin “jihad” yang dipahami. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya pemahaman seseorang atau kelompok tertentu akan senantiasa mempengaruhi tindakannya dalam merespon setiap sesuatu.

Peningkatan pemahaman dalam memaknai ajaran agama tersebut di atas selaras dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Basyir Syam dalam wawancaranya dengan penulis. Beliau menjelaskan:

“Bahwa perlu adanya peningkatan dan pemahaman dan penguasaan terhadap bacaan dan kandungan al-Quran, Tetapi tidak sekedar itu mestinya juga dibarengi dengan pemahaman yang benar terhadap sunnah-sunnah nabi yang selalu mengajarkan kedamaian dan kerahmatan. Istilah sunnah-sunnah nabi saw dipakai di sini untuk membedakannya dengan hadis Nabi Saw, sebab sunnah nabi Saw lebih luas dari hadis nabi Saw. Sunnah Nabi Saw tidak hanya diperoleh dari buku-buku hadis, tetapi teladan Nabi Saw lebih banyak kita dapatkan dalam buku-buku sirah (sejarah). Sebagai umat islam terkadang mengambil teladan dari Nabi Saw. Hanya sekedar membaca hadis Nabi yang terdapat dalam buku-buku himpunan hadis, tetapi kurang membaca sejarah Nabi Saw. Yang agung itu. Dengan melakukan pembacaan ulang terhadap sejarah nabi Saw yang agung secara holistik dan tidak parsial dapat mengurangi munculnya paham radikal dalam masyarakat.”

⁷⁷ Buku Diklat Panduan Khusus FPI, *op., cit.*, h. 18.

Disamping peningkatan pemahaman sebagaimana yang diuraikan di atas, upaya lain yang bersifat preventif menurut penulis adalah menegakkan hukum secara efektif. Efektivitas hukum yang dimaksud disini adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh L. J. Van Apeldoorn, yakni keberhasilan, kemanjuran, atau kemujaraban hukum atau undang-undang untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai.⁷⁸ Sebab, jika hukum berlaku secara efektif, maka tindakan anarkisme/kekerasan yang terjadi antara FPI (khususnya FPI Kota Makassar) dengan aliran lain yang dianggap sesat serta penegak hukum konsisten dalam memberantas patologi sosial yang secara yuridis telah dilarang oleh hukum, maka tindakan kekerasan yang dilakukan oleh FPI tidak akan terjadi. Hal ini sesuai dengan penelitian penulis pada FPI Kota Makassar. Menurut Abdur Rahman, setiap tindakan yang dilakukan oleh FPI dalam menindaki setiap peristiwa atau fenomena yang melanggar hukum, terlebih dahulu pihak FPI menyurati pihak yang berwenang (kepolisian) untuk menindakinya, namun hal tersebut tidak direspon. Sehingga atas dasar itu kemudian FPI (khususnya FPI Kota Makassar) bertindak sendiri.

Dari redaksi kalimat yang diungkapkan oleh Abdur Rahman serta melihat prosedur standar aksi FPI nampak jelas bahwa tindakan/aksi yang dilakukan oleh FPI merupakan tindakan akhir setelah FPI memberitahukan

⁷⁸ Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum: Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2012, hal. 202

adanya pelanggaran hukum kepada institusi yang berwenang. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar pihak yang berwenang segera menegakkan hukum.

Selain itu, berdasarkan sebab terjadinya aksi/tindakan kekerasan oleh FPI sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tindakan preventif yang perlu dilakukan adalah mengefektifkan berlakunya hukum di dalam kehidupan sosial, seperti mengefektifkan penegakan hukum bagi tindakan penodaan agama yang nyata-nyata telah dilarang oleh aturan hukum. Sebab, sebagaimana yang penulis peroleh dari penelitian, ditemukan satu alasan yang cukup mendasar kenapa FPI (khususnya FPI Kota Makassar) bertindak sendiri dalam menindaki oknum-oknum atau kelompok yang melakukan penodaan terhadap agama. Alasan mendasar tersebut adalah tidak efektifnya penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap oknum-oknum atau kelompok yang menodai agama (aliran sesat), serta tidak tegasnya aparat penegak hukum menindaki patologi sosial yang secara yuridis telah dinyatakan sebagai perbuatan/tindakan melanggar hukum. Atas dasar hal tersebut, maka jika hukum diefektifkan keberlakuannya oleh aparat penegak hukum, maka tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh FPI dapat dicegah atau setidaknya dapat diminimalisir.

Selain upaya preventif sebagaimana yang dikemukakan di atas, jika sekiranya pemahaman FPI (khususnya FPI Kota Makassar) terkait adanya tindakan yang melanggar hukum (seperti penodaan agama, adanya tempat-

tempat kemaksiatan) tidak sesuai dengan pemahaman aparat penegak hukum, dalam artian FPI menganggapnya sebagai tindakan melanggar hukum, sementara oleh negara (penegak hukum) berdasarkan hukum positif yang berlaku tidak dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, maka berdasarkan prosedur aksi FPI sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tindakan kekerasan dapat dicegah. Pencegahan ini dilakukan dengan cara, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai institusi yang bertugas menciptakan ketertiban di tengah kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara harus segera mengawal secara ketat tindakan/aksi FPI.

Yang tak kalah pentingnya menurut hemat penulis sebagai upaya preventif terhadap kekerasan atas nama agama (khususnya kekerasan yang dilakukan oleh FPI) dalam optic sosiologi hukum adalah keadaan yang terjadi tersebut harus menjadi bahan evaluasi hukum. Dalam artian, maraknya kekerasan atas nama agama harus dijadikan bahan evaluasi untuk dilahirkan satu regulasi baru terkait masalah keagamaan atau kah mengevaluasi kembali aturan perundang-undangan terkait masalah penodaan agama. Sebab, menurut penulis aturan-aturan tersebut tidak memiliki kepastian hukum, sehingga antara aparat penegak hukum dan khususnya Ormas keagamaan (termasuk FPI) memiliki persepsi yang berbeda terkait masalah penodaan agama, dan lain-lain.

Jika hal tersebut di atas, mampu dirumuskan serta dalam perumusannya melibatkan seluruh stakeholder (termasuk ormas FPI), maka

tindakan kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh Ormas-Ormas tertentu (termasuk FPI) dapat dicegah atau setidaknya dapat diminimalisir. Pasalnya, telah ada kepastian hukum (kesamaan konsepsi), sehingga apa yang dianggap melanggar hukum bagi Ormas-Ormas keagamaan (khususnya FPI), dianggap pula sebagai pelanggaran hukum bagi Negara (aparatus penegak hukum/khususnya kepolisian). Sehingga ketika penegakkan hukum dapat diefektifkan (langsung penegak hukum yang menindaki pelanggaran tersebut sebagai institusi yang berwenang), maka tindakan kekerasan atau konflik keagamaan (khususnya di Kota Makassar) dapat dicegah atau setidaknya dapat diminimalisir. Sehingga dengan demikian, kebebasan beragama (kebebasan yang terbatas) sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 akan dapat terwujud dengan baik.

Dari uraian di atas, maka upaya preventif terhadap kekerasan/konflik keagamaan di Kota Makassar dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Melakukan peningkatan pemahaman agama, agar tidak memahami jihad dalam arti sempit yang berujung pada adanya kekerasan/anarkisme.
- b. Mengefektifkan penegakan hukum, khususnya bagi tindakan/perbuatan oknum-oknum/kelompok-kelompok tertentu yang melanggar hukum, baik oleh FPI maupun aparat penegak hukum (hukum Negara/hukum positif) dinilai sebagai tindakan melanggar hukum.

- c. Aparat penegak hukum harus melakukan pengawasan ketat terhadap setiap aksi yang dilakukan oleh FPI jika apa yang dianggap oleh FPI sebagai tindakan melanggar hukum tidak ditindaki oleh aparat penegak hukum, karena berdasarkan hukum Negara (hukum positif) tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan atau perbuatan melanggar hukum oleh institusi berwenang (penegak hukum).
- d. Perlu adanya evaluasi atau regulasi baru terkait masalah aturan perundang-undangan mengenai keberagamaan yang lebih menjamin kepastian hukum, sehingga tidak melahirkan multipersepsi dan perbedaan persepsi antara Ormas dan penegak hukum.

1.2. Upaya Represif.

Upaya represif yang dimaksud disini adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindakan/aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI (khususnya FPI Kota Makassar). Tindakan yang dimaksud adalah pemidanaan jika memang terbukti gerakan yang dilakukan FPI adalah melanggar hukum materiil (hukum pidana).

Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya di dalam lapangan hukum pidana, tidaklah dimungkinkan tindak pidana tersebut dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi. Kalau pun ada oknum tertentu yang melakukan tindakan kekerasan (melanggar hukum), maka sanksi pidana tidak mungkin dilakukan pada organisasinya, melainkan kepada oknum yang melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam penelitian penulis sebagaimana ditunjukkan dalam data Reskrim Polrestabes Makassar di atas, telah terdapat beberapa kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian. Namun, dari penindakan kasus kekerasan tersebut di atas belum mampu menciptakan diskontinuitas kekerasan yang dilakukan oleh FPI. Pasalnya, setelah terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian) terhadap oknum yang melakukan kekerasan (tindak pidana), kekerasan serupa bukannya berkurang malah justru meningkat. Mencermati hal ini, menurut hemat penulis, pada dasarnya disebabkan oleh kurang tegasnya upaya penegakkan hukum pidana yang dilakukan oleh penegak hukum. Padahal sebagaimana diketahui bersama bahwa tujuan pemindaan dalam hukum adalah:

- a. Menghukum para pelaku kejahatan dengan memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan (menciptakan efek jera).
- b. Memberikan pelajaran pada orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa.
- c. Memberikan pembinaan mental kepada para pelaku dan memberikan keterampilan pada mereka yang menjalani masa pemindaan (memasyarakatkannya). Hal ini bertujuan agar setelah keluar dari pemindaan yang ada, pelaku dapat kembali menjadi masyarakat yang baik di tengah-tengah kehidupan sosialnya.

Selain upaya di atas, upaya represif yang mesti dilakukan agar tidak terjadi lagi kekerasan/konflik keagamaan yang dilakukan oleh Ormas-Ormas tertentu (khususnya FPI) adalah institusi yang berwenang harus tegas dalam memberlakukan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Ormas. Sebab, sebagaimana yang dijelaskan di dalam undang-Undang tersebut bagi Ormas yang melanggar kewajiban (pasal 21) dan larangan (pasal 59), maka konsekuensinya adalah akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi-sanksi tersebut adalah:

- a. peringatan tertulis
- b. penghentian bantuan dan/atau hibah
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Berdasarkan penelitian penulis, selama tindakan/aksi yang dilakukan oleh FPI dalam menegakkan nahi mungkar senantiasa diwarnai dengan adanya tindakan kekerasan, dimana sesungguhnya tindakan tersebut adalah melanggar kewajiban dan larangan bagi sebuah Ormas. Namun, sampai saat ini FPI masih tetap melaksanakan kegiatannya (aksinya). Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tersebut hanya memiliki keberlakuan yuridis, tetapi tidak memiliki keberlakuan sosiologis.

Sebab, di dalam kenyataanya Undang-Undang tersebut belum berlaku di dalam kehidupan sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di dalam Bab pembahasan, maka pada Bab ini, penulis akan menyimpulkan masalah “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap aksi organisasi kemasyarakatan FPI dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di Kota Makassar” adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi FPI sebagai sebuah Organisasi Kemasyarakatan yang menjadikan Islam sebagai asas organisasi pada dasarnya ditinjau dari optik sosiologi hukum (hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya), kelahirannya disebabkan oleh kegagalan hukum dalam menjalankan fungsinya di dalam kehidupan sosial. Kegagalan ini antara lain terjadinya ketidakadilan, pelanggaran HAM yang korbannya mayoritas umat Islam, serta norma hukum yang ada saat itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Namun dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, FPI seringkali melakukan tindakan anarkisme dan melanggar hak asasi manusia dengan alasan penegakkan amar ma'ruf nahi mungkar mengatasnamakan penodaan agama. Sebab, antara FPI dan aparat penegak hukum terkadang memiliki perbedaan persepsi terkait masalah penodaan agama. Sehingga

atas dasar itu, ditinjau dari sosiologi hukum mestinya harus ada regulasi yang mengatur secara pasti terkait standarisasi penodaan agama.

2. Adapun upaya yang ditempuh untuk menanggulangi aksi organisasi FPI kaitannya dengan konflik keagamaan adalah dengan menempuh dua cara, yakni cara yang bersifat preventif dan cara yang bersifat represif. Cara yang bersifat preventif ini berupa peningkatan pemahaman agama bagi anggota FPI, khususnya persoalan Jihad, penegakkan hukum secara efektif oleh penegak hukum, sehingga FPI tidak main hakim sendiri. Dan terakhir untuk tindakan preventif adalah aparat kepolisian harus melakukan pengawalan ketat terhadap setiap aksi yang dilakukan oleh FPI. Sedangkan upaya represif adalah dengan cara menindaki secara tegas pelaku tindak pidana dalam aksi yang dilakukan oleh FPI. Sementara itu, tindakan represif secara keorganisasian adalah melakukan teguran secara tertulis, pemberhentian kegiatan, bahkan sampai pada pencabutan status badan hukum/pembubaran.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis terkait karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada intitusi berwenang, khususnya pihak kepolisian agar tegas dalam menegakkan hukum masalah penodaan agama, agar tidak ada tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh kelompok

masyarakat tertentu yang berefek pada lahirnya konflik dan ketidaktertiban di dalam kehidupan sosial.

2. Disarankan kepada para pengambil kebijakan, khususnya para pembuat aturan perundang-undangan agar segera membuat aturan perundang-undangan yang tegas terkait masalah penodaan agama sehingga tercipta kesepahaman dalam menilai tindakan penodaan agama, serta terwujudnya kepastian hukum.
3. Disarankan kepada Ormas terkait agar tetap menjadikan Undang-Undang Ormas sebagai dasar hukum dalam menjalankan kegiatan keormasan, sehingga dapat terwujud ketertiban di dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali . 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- _____, 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung.
- _____, 2009. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Alvin S. Johnshon. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andri Rosadi. 2008. *hitam putih FPI*. Jakarta: Nun Publisher.
- Anggaran Dasar Front Pembela Islam
- Departemen Agama RI Badan penelitian dan pengembangan Agama. 1997/1998. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: Proyek peningkatan kerukunan hidup umat beragama.
- Sajipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Salim. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum: Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2012
- Soerjono Soekanto, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____, 1942. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____, 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumnus.

- _____, 1983. *Teori Sosiologi Hukum Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : Ghali Indonesia.
- Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1982. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudjono Dirdjosisworo. 1983. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudirman Tebba. 2003. *Sosiologi Hukum Islam*. Jakarta: PUI Press.
- Syamsuddin Pasamai. 2011. *Sosiologi dan Sosialogi Hukum*. Makassar: Umitoha Uhkuwah Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum, Cet 2*. Jakarta: Kencana.
- Novri Susan. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Mahmuddin, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 1, (Makassar, 2013)
- Tobroni. 2013. *Relasi Kemanusiaan dalam Keberagamaan (Mengembangkan Etika Sosial Melalui Pendidikan)*. Bandung: Putra Darwati.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Mirza Nasution dan Iman Pasu Purba. 2013. *Jaminan Kehidupan Beragama dalam Konstitusi*. Jakarta: Sofmedia.
- Victor I. Tanja. 1998. *Pluralisme Agama Dan Problem Sosial*. Jakarta: Cidesindo.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pengantar sosiologi hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Zakiyuddin Baidhawi. 2006. *Kredo Kebebasan beragama*. Jakarta: PSAP.
- Zainuddin Ali. 2010. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Internet:

Anonim. *Data tentang Front Pembela Islam (FPI)*, [http// TEOLOGI ISLAM Front Pembela Islam \(FPI\).htm](http://TEOLOGI%20ISLAM%20Front%20Pembela%20Islam%20(FPI).htm).20/10/2013. Diakses pada tanggal 8 November 2013 pukul 21:15 WITA.

Anonim. *UU Ormas Disahkan Pelaku Kekerasan Bisa Disanksi*.
<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/25/1/170899/UU-Ormas-Disahkan-Organisasi-Pelaku-Kekerasan-Bisa-Disanksi>.
Diakses pada tanggal 8 November 2013 pukul 22:05 WITA.

Anonim: [#Alasan_Berorganisasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_sosial).
diakses pada tanggal 23 januari 2014 pukul 20:11 WITA

Undang-undang:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MAKASSAR

Jl. Darul Ma'arif No. 25, Makassar, HP. 08124210762 - 085298455098

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 18 /PCNU-Mks/ V / 14

Berdasarkan surat KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor 6735/P2T-BKPM /19.36/01/VII/2014, Perihal Izin Penelitian pada tanggal 03 Januari 2014.

Dengan ini Pimpinan Nahdhatul Ulama Kota Makassar memberikan keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dengan judul Skripsi, "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM KAITANNYA DENGAN KONFLIK KEAGAMAAN DI KOTA MAKASSAR" kepada sdr (i)

Nama	: ARIANTI
Nomor Pokok	: B 111 10 919
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Jln. Kemerdekaan Km 10, Makassar.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwaamith Thoriq
Wassalamu'alaikum Warahmatullhi Wabaraktuh*

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Makassar

Dr. KH. Baharuddin HS, MA
Rois Syuriah



Drs. H. Abd. Wahid Thahir, M.Ag
Ketua Tanfidziyah



LAPAR

Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat
Institute of People for Education and Advocacy
Jl. Tadulissa 48 No. 5 Makassar Telp/Faks: 8412 423867 e-mail: lapar@laparindonesia.net

No : 003/LAPAR/E/A/II/2014

Makassar, 15 Februari 2014

SURAT KETERANGAN

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Direktur Eksekutif **Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel** dengan ini menerangkan :

Nama : Arianti
Nomor Pokok : B111 10919
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Politeknik No. 57 Tamalanrea Makassar

Bahwa mahasiswa tersebut benar telah mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dalam rangka penyelesaian studi Strata satu (S1) dengan judul penelitian “ **Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan Kota Makassar**”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel


Abd. Karim
Direktur Eksekutif,-



مجلس العلماء الإندونيسي
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Wadah Musyawarah Ulama', Zuama' Dan Cendekiawan Muslim
KOTA MAKASSAR

Alamat: Jl. Masjid Raya No. 1 Telp. 0411 - 3621447 Makassar, www.muimakassar.or.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 082. A/MUI-MKS/II/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, an. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar:

Nama : Dr.K.H. Mustamin Arsyad, Lc, MA

Jabatan : Ketua Umum

Menyatakan bahwa, benar saudara :

Nama : Arianti

Nomor Pokok : B 111 10 919

Fakultas : Ilmu Hukum

Alamat rumah : Jl. Politeknik No. 57 Tamalanrea Makassar

Telah mengadakan penelitian di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar dengan Judul Penelitian sebagaimana tercantum di bawah ini

Judul Skripsi : *" Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan di Kota Makassar"*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarbenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 Februari 2014

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kota Makassar



Dr.K.H. Mustamni Arsyad, Lc, MA
Ketua Umum



DEWAN PIMPINAN DAERAH
FRONT PEMBELA ISLAM SULAWESI SELATAN
Jalan Sungai Limboto No.15 Kode Pos : 90114

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Bismillahi rahmani rahim

Berdasarkan surat KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor 6735/P2T-BKPM/19.36/01/VII/2014, Perihal Izin
Penelitian pada tanggal 7-26 Januari 2014.

Dengan ini Pimpinan Front Pembela Islam Sulawesi Selatan memberikan keterangan Telah
Melaksanakan Penelitian dengan judul Skripsi, "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM KAITANNYA
DENGAN KONFLIK KEAGAMAAN DI KOTA MAKASSAR" kepada sdr (i)

Nama : ARIANTI
Nomor Pokok : B 111 10 919
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Kemerdekaan Km 10, Makassar

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,
Wallahul muafiq illa aqwamit thariq

Makassar , 20 Mei 2014

Pimpinan Front Pembela Islam
Sulawesi Selatan

Ketua Tandfify

MAHABIR MANSUR
DPD-FPI SULSEL

Tembusan : 1. Dekan FH UNHAS Makassar di Makassar
2. Arsip



KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SK / 25 /I/2014/Reskrim

1. Rujukan, surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sulsel : 6735/P2T-BKPM/19.36/01/VII/2014, tanggal 03 Januari 2014 perihal permohonan izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa :

N a m a : ARIANTI
Nim / Jurusan : B 111 10 919 / Ilmu Hukum
Instansi / Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar.

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan topik : **"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP AKSI ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM KAITANNYA DENGAN KONFLIK KEAGAMAAN DI KOTA MAKASSAR"**.

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 23 Januari 2014

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



u.b.

W A K A

GANYALAMSYAH HATTA, S.IK

KOMISARIS POLISI NRP 79010762

Tembusan :

1. Kapolda Sulsel
2. Irwasda Polda Sulsel
3. Kapolrestabes Makassar
4. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA MAKASSAR**

Jalan G.Lompobattang No. 201 Tlp. 0411-3650730 Makassar
e-mail :muhammadiyah makassar@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 002/SKT /III.0/D/2014

Bismillahi rahmani rahim

Berdasarkan surat KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor 6735/P2T-BKPM/19.36P/01/VII/2014, Perihal Izin Penelitian pada tanggal 03 Januari 2014.

Dengan ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar memberikan Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dengan judul Skripsi, **"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KSI ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM KAITANNYA DENGAN KONFLIK KEAGAMAAN DI KOTA MAKASSAR"** kepada sdr(i)

Nama : **ARIANTI**
Nomor Pokok : **B 111 10 919**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Jln. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar**

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jazaakumullahu Khaeral Jazaa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

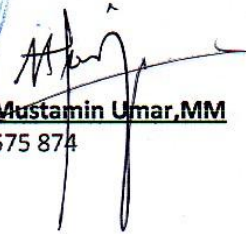
Makassar, 16 Rabiul Awwal 1435 H
18 Januari 2014 M

Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kota Makassar

Ketua

Drs. KH. Jalaluddin Sanusi
NBM. 450 511



Sekretaris

Drs. H. Mustamin Umar, MM
NBM. 575 874

Tembusan :

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sul-Sel
2. Dekan FH UNHAS Makassar di Makassar